



**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET
TETAP MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
DAN PERPAJAKAN SERTA PENGARUH TERHADAP
LABA PERUSAHAAN**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
pada program studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

Oleh:

**Irda Puspa Rini
1730403041**

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irda Puspa Rini
Nim : 1730403041
Tempat/ Tanggal Lahir : Paninjauan / 12 Juli 1998
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan Serta Pengaruh Terhadap Laba Perusahaan” adalah benar hasil karya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya akan bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Irda Puspa Rini
NIM.1730403041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Irda Puspa Rini NIM: 1730403041, dengan judul "Analisis Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Serta Pengaruh Terhadap Laba Perusahaan" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 17 Januari 2022

Ketua Jurusan
Akuntansi Syariah



Yeni Melia, SE. MM
NIP. 198505052015032005

Pembimbing



Desy Farha, SE., M.Si
NIP.-

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar


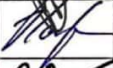



Dr. H. Rizal, M. Ag. CRP[®]
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama Irda Puspa Rini, NIM 1730403041, dengan judul "**Analisis Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Serta Pengaruh Terhadap Laba Perusahaan**", telah diuji dalam Sidang *Munqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis 27 Januari 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) Strata-1 (S-1) dalam ilmu Akuntansi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Desy Farina, SE., M.Si NIP.-	Ketua Sidang/ Pembimbing		18/2 2022
2	Nasfizar Guspendri, SE., M.Si NIP.19750823 200312 1 004	Penguji I		17/2-2022
3	Yeni Melia, SE.MM NIP.19850505 201503 2 005	Penguji II		10/2/22.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar




Dr. H. Rizal, M. Ag.CRP*
NIP. 19731007 2002121 001

ABSTRAK

Irda Puspa Rini. NIM 1730403041 Judul Skripsi: **“Analisis Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Serta Pengaruh Terhadap Laba Perusahaan”**. Program Sarjana Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam perhitungan penyusutan aset tetap menurut standar akuntansi dan perpajakan serta bagaimana pengaruhnya terhadap laba perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan penyusutan aset tetap yang diterapkan perusahaan perusahaan Unilever Indonesia.Tbk berupa aset tetap dan laporan laba rugi pada periode 2016-2020 baik menurut standar akuntansi maupun perpajakan dan untuk mengetahui penyusutan tersebut berpengaruh terhadap laba perusahaan Unilever Indonesia Tbk berupa aset tetap dan laporan laba rugi pada periode 2016-2020

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu data yang disajikan dan diperoleh dari laba rugi, sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu berupa laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan penyusutan menurut standar akuntansi keuangan dan perpajakan Perhitungan penyusutan aset tetap oleh perusahaan lebih kecil biaya penyusutan dari perhitungan perpajakan, hal ini dikarenakan perbedaan umur manfaat oleh perusahaan dengan perpajakan. Laba perusahaan lebih besar dari laba fiskal sehingga mengakibatkan terjadinya koreksi fiskal negatif

Kata Kunci: Penyusutan Aset Tetap, Standar Akuntansi Keuangan, Perpajakan, Laba Perusahaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan penelitian	4
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	4
G. Definisi Operasional.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Landasan teori.....	7
1. Asset Tetap	7
2. Standar Akuntansi keuangan (SAK).....	11
3. Laporan Keuangan	13
4. PSAK Nomor 16 Tentang Aset Tetap	18
5. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2014	19
6. Penyusutan berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK).....	20
7. Metode Penyusutan.....	24
8. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan	28
9. Koreksi Fiskal	38
10. Laba Usaha	40
11. Hubungan Penyusutan Asset Tetap Dengan Laba Perusahaan ...	40
B. Penelitian Terdahulu.....	41

C. Kerangka Berfikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis penelitian	46
B. Tempat dan waktu penelitian.....	46
C. Sumber data	47
D. Populasi dan Sampel.....	47
E. Teknik pengumpulan data	47
F. Teknik analisis data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran umum PT Unilever Indonesia	48
1. Profil PT Unilever Indonesia	48
2. Visi dan Misi PT Unilever Indonesia tbk	51
3. Struktur Organisasi PT Unilever Indonesia	51
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif Penyusutan Aset Tetap Menurut Peraturan Perpajakan.....	29
Tabel 2. 2 Jenis harta berwujud yang termasuk kedalam kelompok I	30
Tabel 2. 3 Jenis harta berwujud yang termasuk kedalam kelompok II	32
Tabel 2. 4 Jenis harta berwujud yang termasuk kedalam kelompok III.....	35
Tabel 2. 5 Jenis harta berwujud yang termasuk kedalam kelompok IV	37
Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian	46
Tabel 4. 1 Penyusutan Aset Tetap Menurut Komersial PT Unilever Indonesia Tbk Periode 2016-2020.	55
Tabel 4. 2 Penyusutan Aset Tetap PT Unilever Indonesia Tbk.	56
Tabel 4. 3 Penyusutan aset tetap menurut perpajakan PT Unilever Indonesia Tbk	58
Tabel 4. 4 Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Peraturan Perpajakan Periode 2016-2020	60
Tabel 4. 5 Koreksi Fiskal Penyusutan Aset Tetap PT Unilever Indonesia Tbk yang Berakhir 31 Desember 2016.....	64
Tabel 4. 6 Koreksi Fiskal Penyusutan Aset Tetap PT Unilever Indonesia Tbk yang Berakhir 31 Desember 2017.....	65
Tabel 4. 7 Koreksi Fiskal Penyusutan Aset Tetap PT Unilever Indonesia Tbk yang Berakhir 31 Desember 2018.....	65
Tabel 4. 8 Koreksi Fiskal Penyusutan Aset Tetap PT Unilever Indonesia Tbk yang Berakhir 31 Desember 2019.....	66
Tabel 4. 9 Koreksi Fiskal Penyusutan Aset Tetap PT Unilever Indonesia Tbk yang Berakhir 31 Desember 2020.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	45
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	52

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan utama yaitu untuk mencari laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya atas investasi yang ditanamkan dalam perusahaan, agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan. Salah satu bentuk investasi dalam perusahaan ada yang sering digunakan dalam kegiatan perusahaan yaitu aset yang mempunyai masa umur manfaat lebih dari satu periode. Aset tetap merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap tahun. Aset ini digolongkan menjadi Aset Tetap Berwujud (*Tangible Fixed Assets*) dan Aset Tetap Tidak Berwujud (*Intangible Assets*). Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap termasuk tanah, struktur bangunan (kantor, pabrik, gudang), dan peralatan (mesin, funitur, dan alat).

Sebagian besar perusahaan menggunakan biaya historis sebagai dasar untuk menilai aset tetap. Biaya historis (*historical cost*) mengukur harga kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan mempersiapkan kondisi yang diperlukan untuk digunakan. Perusahaan akan mengakui aset tetap ketika biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan besar kemungkinan bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomi masa depan. (Weygandt, 2019, p. 631)

Tinggi rendahnya laba yang diperoleh berhubungan dengan nilai penyusutan yaitu dimana biaya penyusutan kepada biaya operasional terhadap laba laporan laba rugi, sehingga besarnya laba penyusutan akan memengaruhi besar kecilnya laba yang akan diperoleh perusahaan.

Perhitungan terhadap beban penyusutan aset tetap dapat menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) maupun dengan peraturan perpajakan. Metode penyusutan menggunakan standar akuntansi keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dan

keadaan finansial suatu perusahaan, sedangkan metode penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan digunakan untuk kepentingan pajak. Penyusutan selain harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) juga harus sesuai dengan undang-undang perpajakan karena selain perusahaan harus membuat laporan keuangan komersial juga harus membayar pajak kepada kas negara. Perbedaan penggunaan kedua metode tersebut akan berdampak pada laporan laba rugi perusahaan.

Mengingat beban penyusutan aset tetap di laporkan dalam laporan laba rugi perusahaan yang akan berdampak pada laba perusahaan, maka sebaiknya perhitungan penyusutan aset tetap di lakukan dengan menggunakan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK No 16 atau menurut peraturan perpajakan Nomor PER-20/PJ/2014.

Oleh karena itu metode penyusutan aset tetap harus ditentukan secara tepat agar biaya penyusutan yang di bebaskan dapat mencerminkan kewajaran aset tetap pada neraca. Besarnya biaya penyusutan aset tetap mempengaruhi besar atau kecilnya laba perusahaan. Apabila perhitungan beban penyusutan kurang teliti dalam penggunaan metode penyusutan aset tetap pada perusahaan, maka akan mempengaruhi besarnya laba rugi perusahaan setiap periodenya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar modal yang terdapat di Indonesia yang telah menjadi alternatif yang disukai perusahaan untuk mencari dana. Perkembangan bursa efek dapat dilihat dengan semakin banyaknya anggota bursa juga dapat dilihat dari perubahan harga-harga saham yang diperdagangkan.

PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh dan jus buah. Portofolio perusahaan mencakup banyak merek yang dicintai dan terkenal di dunia, seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Wall's, Blue Band, Royco, Bango dan masih banyak lagi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1933. Alasan penulis memilih PT

Unilever Indonesia Tbk untuk diteliti dikarenakan perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan ternama di Indonesia serta produknya sudah banyak dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia. Perusahaan Unilever Indonesia Tbk menyusutkan aset menggunakan metode garis lurus dengan menggunakan standar akuntansi keuangan namun adanya perbedaan antara standar akuntansi keuangan dengan perpajakan akan berpengaruh terhadap laba perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian terhadap penyusutan aset tetap menurut standar akuntansi dan perpajakan untuk mengetahui perbandingan penyusutan aset tetap dan bagaimana pengaruhnya terhadap laba perusahaan dengan menggunakan metode penyusutan tersebut agar dapat mengetahui perbedaan pengaruh dan memberikan manfaat terhadap kewajaran nilai aset tetap dan penulis menulis Skripsi dengan judul “*Analisis Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan Serta Pengaruh Terhadap Laba Perusahaan.*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas maka dapat diidentifikasi suatu masalah yang ada sebagai berikut:

1. Metode perhitungan penyusutan aset tetap yang digunakan pada perusahaan Unilever Indonesia sesuai dengan SAK dan perpajakan atau belum.
2. Pengaruh metode perhitungan penyusutan aset tetap terhadap laba perusahaan Unilever Indonesia.
3. Dalam memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan perusahaan mengenai aset tetap perusahaan telah menerapkan PSAK 16 atau belum.
4. Penerapan perhitungan dan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perusahaan memperhatikan dasar hukum fiscal dalam UU pajak.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penyusutan dalam aset tetap berdasarkan standar akuntansi dan perpajakan pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk, berupa aset tetap dan laporan laba rugi periode 2016-2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana perbandingan metode penyusutan pada laporan keuangan perusahaan menurut standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan serta pengaruhnya terhadap laba perusahaan Unilever Indonesia Tbk pada periode 2016-2020.

E. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah dapat mengatasi upaya pemecahan masalah atau merupakan kesimpulan hasil penelitian yang diharapkan oleh penulis dengan tujuan melakukan penelitian adalah: Untuk mengetahui : Bagaimana perbandingan metode penyusutan pada laporan keuangan perusahaan menurut standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan serta pengaruhnya terhadap laba perusahaan Unilever Indonesia Tbk pada periode 2016-2020..

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

a. Manfaat penelitian

1. Manfaat penelitian bagi akademik

Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan referensi serta menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1) Manfaat penelitian bagi penulis

- a) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi pada jurusan akuntansi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam di institut agama islam negeri (IAIN Batusangkar).

b) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang Penyusutan Aset tetap

2) Manfaat penelitian bagi perusahaan

Manfaat bagi perusahaan yaitu memberikan gambaran kepada perusahaan bagaimana gambaran metode apa yang bagus di gunakan bagi perusahaan yang memberikan laba yang besar.

2. Luaran Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan dapat menjadi referensi di perpustakaan IAIN Batusangkar, diharapkan penelitian ini dapat diterbitkan di jurnal penelitian.

G. Definisi Operasional

Penyusutan umumnya terjadi ketika aktiva tetap telah digunakan dan merupakan beban bagi periode dimana aktiva dimanfaatkan. Praktek pembebanan penyusutan akan mencerminkan tingkat penggunaan aktiva yang layak dan jumlah laba yang tepat untuk dilaporkan. Penyusutan dilakukan karena masa manfaat dan potensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva tersebut dibebankan secara berangsur-angsur atau proposional ke masing-masing periode yang menerima manfaat.

Aset tetap sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap termasuk tanah, struktur bangunan (kantor, pabrik, gudang), dan peralatan

PSAK 16 PSAK Nomor 16 adalah standar akuntansi yang di susun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan perusahaan mengenai aset tetap. PSAK Nomor 16 tentang aset tetap disahkan oleh dewan standar akuntansi keuangan tanggal 29 November 2011 yang tercemin dalam pernyataan standar akuntansi keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah kerangka dalam pembuatan prosedur laporan keuangan agar

terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan standar akuntansi yang digunakan di Indonesia yang disusun dan diterbitkan oleh dewan standar akuntansi keuangan yang dibentuk oleh ikatan akuntansi Indonesia.

Perpajakan susunan dalam satu naskah dari undang- undanf Republik Indonesia yaitu undang- undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Laba merupakan selisih antara pendapatan dengan beban sehingga laba dapat mengukur masukan (dalam bentuk yang di ukur dengan biaya) dan keluaran (dalam pendapatan yang diperbolehkan)

Selisih antara seluruh pendapatan dan beban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Laba merupakan suatu kelebihan pendapatan atau keuntungan yang layak diterima oleh perusahaan, karena perusahaan tersebut telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan lain pada jangka waktu tertentu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan teori

1. Asset Tetap

a. Pengertian aset tetap

Aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Aset ini mempunyai wujud sehingga seringkali aset tetap disebut dengan aset tetap berwujud (*tangible fixed asset*). (Mulyadi, 2017, p. 497)

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau untuk tujuan administrative; aset-aset tersebut diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Aset tetap termasuk tanah, struktur bangunan (kantor, pabrik, gudang). Dan peralatan (mesin, furnitur, dan alat) karakteristik utama dari aset adalah sebagai berikut:

- 1) Aset-aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali.

Hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasi sebagai aset tetap. Misalnya sebuah bangunan yang mengangur lebih tepat diklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi. Aset tetap yang dimiliki untuk kemungkinan apresiasi harga diklasifikasikan sebagai investasi selain itu, aset tetap yang dimiliki untuk dijual atau pelepasan secara terpisah diklasifikasikan dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Pengembang tanah atau pengelola mengklasifikasikan tanah sebagai persediaan.

- 2) Aset-aset tersebut bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan.

Aset tetap memberikan manfaat selama beberapa tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini untuk beberapa periode mendatang. Melalui biaya penyusutan periodic. Pengecualian kaidah ini adalah tanah, yang disusutkan hanya jika penurunan nilai material terjadi seperti, kerugaian pada kesuburan lahan pertanian karena rotasi tanaman yang baik, kekeringan atau erosi tanah.

3) Aset aset tersebut memiliki substansi fisik

Ditandai dengan keberadaan fisik atau substansi. Hal ini membedakan aset tetap dari aset tak berwujud, seperti paten atau *goodwill*. Namun, tidak seperti bahan baki, aset tetap tidak secara fisik menjadi bagian dari produk yang dimiliki untuk dijual kembali. (Weygandt, 2019, p. 631)

Aset tetap terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

- Aset tetap umur terbatas seperti mesin
- Aset tetap umur tidak terbatas seperti tanah

Aset tetap yang mempunyai umur terbatas akan disusutkan. Umur aset akan ditentukan berdasarkan kemampuannya memberikan manfaat bagi perusahaan. Di neraca, aset tetap dilaporkan sebesar nilai bersihnya yaitu harga beli dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk aset dengan umur tidak terbatas tidak akan susut. Tanah merupakan contoh klasik tentang aset dengan umur tidak terbatas. (Prihadi, 2019, p. 48)

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu –digunakan dalam operasional- dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. (Puwarji, 2017, p. 187)

b. Penentu Biaya Perolehan Aset Tetap

Berdasarkan SAK ETAP 2009 kepemilikan aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya- harga beli (setelah dikurangi dikurangi

potongan-potongan) ditambah dengan biaya- biaya yang berhubungan dengan perolehan aset sehingga aset tersebut siap dipakai atau digunakan untuk kegiatan operasional normal perusahaan, biaya- biaya yang dikeluarkan setelah kepemilikan aset tetap , biasanya langsung diakui sebagai beban dan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi untuk pengeluaran yang menambah kegunaan aset tersebut, baik menambah umur ekonomis, meningkatkan kapasitas, meningkatkan standar kerja, maupun meningkatkan arus kas masuk dimasa yang akan datang dikapitalisasi ke dalam biaya perolehan aset tetap. Penentu biaya perolehan aset tetap tidak selalu mudah. Hal ini dipengaruhi oleh cara perolehan, bentuk dan sifat dari aset itu sendiri. Selanjutnya akan dibahas mengenai penentuan biaya perolehan aset tetap.

1) Tanah

Tanah yang dikategoriksn sebagai aset tetap adalah tanah yang digunakan untuk operasional perusahaan. Contohnya yakni tanah untuk tempat berdirinya bangunan-bangunan kantor, tanah untuk lahan parkir kendaraan, tanah untuk pertanian dan sebagainya biaya perolehan tanah tidak hanya berupa harga beli saja tetapi termasuk juga biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh tanah

2) Bangunan

Bangunan yang dimaksud disini adalah gedung-gedung yang digunakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan contohnya yaitu: kantor, pabrik, showroom, gudang, parkir dan sebagainya. Biaya perolehan bangunan terdiri dari harga beli bangunan ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk memperoleh bangunan tersebut sehingga bangunan siap digunakan.

3) Kendaraan

Kendaraan merupakan alat angkut/ transportasi yang digunakan untuk operasional perusahaan. Contohnya yakni mobil

boxs truck, pickup, bus, sepeda motor, bus mini, dan sebagiannya. Seperti halnya aset tetap lainnya pada kendaraan juga terdapat biaya perolehan, biaya tersebut meliputi harga faktur, bea balik nama, ongkos angkut, biaya asuransi dalam perjalanan dan biaya lainnya.

4) Peralatan

Peralatan yang dikategorikan sebagai aset tetap dan digunakan dalam operasional perusahaan diantaranya adalah peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, dan sebagainya. Biaya perolehan peralatan tersebut meliputi harga faktur peralatan ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mendapatkannya.

c. Cara perolehan aset tetap

Penentuan biaya perolehan aset tetap tidak selamanya mudah dilakukan. Hal tersebut dipengaruhi oleh cara mendapatkan aset tetap itu sendiri. Ada beberapa cara perolehan aset tetap yang mempengaruhi biaya perolehannya. Cara tersebut yakni dengan membeli secara tunai, membeli secara kredit, membeli secara gabungan. Aset tetap juga dapat diperoleh dari sumbangan (donasi) dari pihak ketiga, membangunnya sendiri (gedung) dan sebagainya (Puwarji, 2017, pp. 187-194).

d. Pengeluaran selama pemakaian aset tetap

Selama pemakaian aset tetap dalam kegiatan operasional, perusahaan sering melakukan pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat bersifat pengeluaran sehari-hari (*cost of day-to-day*) maupun pengeluaran yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Peneluaran-pengeluaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. *pertama* pengeluaran modal (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang berhubungan dengan kepemilikan dan pemakaian suatu aset tetap memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran tersebut harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset

tetap yang bersangkutan. *Kedua*, pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) yaitu meliputi pengeluaran – pengeluaran terkait dengan kepemilikan dan pemakaian aset tetap yang memberikan manfaat dalam periode akuntansi atau kurang. Pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai beban pada periode ketika pengeluaran itu terjadi. Pengeluaran - pengeluaran selama pemakaian aset tetap tersebut meliputi beberapa hal berikut.

1) Pemeliharaan (*maintenance*)

Pengeluaran pemeliharaan ini untuk memelihara aset tetap dengan tujuan agar aset tidak cepat usang dan tidak cepat rusak dari waktu ke waktu sehingga dapat digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan secara normal.

2) Reparasi (*repair*)

Pengeluaran reparasi adalah pengeluaran untuk perbaikan (reparasi) suatu aset yang mengalami kerusakan dengan tujuan agar aset dapat dipergunakan sesuai dengan fungsi semestinya.

3) Perbaikan (*betterment*)

Tujuan dari pengeluaran ini untuk perbaikan suatu aset tetap tidak hanya sekedar agar aset tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsi semestinya, tetapi juga untuk menambah nilai atau memperpanjang umur kegunaannya.

4) Pengantian (*replacement*)

Pengeluaran- pengeluaran yang bertujuan untuk mengganti komponen-komponen dari aset tetap, biasanya terjadi karena bagian komponen aset memang telah rusak berat. Pengantian komponen tersebut akan menambah umur ekonomis atau meningkatkan masa manfaat aset. (Puarji, 2017, pp. 199-200)

2. Standar Akuntansi keuangan (SAK)

Dengan semakin derasnya investasi asing ke Indonesia yang ditandai dengan terbukanya Indonesia sebagai tempat investasi asing memungkinkan terbentuknya pasar modal Indonesia. Sebagai konsekuensi

di bidang akuntansi perlu menciptakan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Pihak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah bagi profesi akuntansi Indonesia melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yaitu Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang berlaku di Indonesia pada tahun 1973. Perkembangan berikutnya pada tahun 1984 pihak Komite PAI melakukan revisi mendasar terhadap PAI 1973 yang diterbitkan dalam PAI 1984 agar ketentuan akuntansi mengikuti perkembangan dunia usaha. Demikian halnya pada tahun 1994 sebagai kelanjutannya melakukan revisi kembali dan mengodifikasi dalam Standar Akuntansi Keuangan dan berganti dengan Standar Akuntansi Keuangan serta pihak IAI mulai melangkah lebih jauh melakukan harmonisasi tetapi menjadi adaptasi dan adopsi dalam rangka konvergensi dengan *International Reporting Standar* (IFRS). Indonesia sebagai anggota dari *International Federation of Accountant (IFAC)* berkewajiban untuk mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Sesuai yang ditetapkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) bahwa tahun 2012 Indonesia mengadopsi seluruh IFRS (Waluyo, 2019, pp. 7-8)

Sejak tahun 2012 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengadopsi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang merupakan standar akuntansi yang dipakai oleh negara-negara Eropa dan menjadi standar global. SAK disusun untuk organisasi yang memiliki akuntabilitas publik. Entitas dianggap memiliki akuntabilitas publik dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut adalah badan usaha yang masih proses pendaftaran atau sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau sedang dalam proses pengajuan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal
- b. Entitas tersebut menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia bagi sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, entitas

dana pension, reksa dana dan bank investasi. Semua entitas tersebut memiliki pertanggung jawaban kepada public.

Manfaat SAK adalah meningkatkan daya banding laporan keuangan, memberikan informasi yang berkualitas dipasar modal internasional, menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan, dan mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi entitas multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analisis.

SAK wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas public seperti: emiten, entitas public, perbankan, asuransi, dan BUMN dengan tujuan memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Indonesia melakukan adopsi melalui dua tahap. Tahap pertama 1 januari 2012 dan proses adopsi kedua efektif 1 januari 2015. Laporan keuangan menurut SAK adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. (Syaiful, 2020, pp. 19-20)

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan adalah informasi keuangan sebuah perusahaan pada sebuah periode (laporan keuangan bulanan, tiga bulan, semesteran, dan tahunan). Setidaknya terdapat 4 jenis laporan keuangan yang umum digunakan oleh perusahaan yaitu antara lain: laporan laba rugi (*income statement*), laporan [erubahan modal, neraca (*balance sheet*) laporan arus kas (*cash flow*), laporan keuangan berfungsi untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja perusahaan serta menunjukkan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan informasi tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

Dalam upaya untuk membuat keputusan yang rasional pihak ekstern perusahaan maupun pihak intern perusahaan seharusnya

menggunakan suatu alat yang mampu menganalisis laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Beberapa pengertian laporan keuangan menurut para ahli yaitu:

- a. Munawir (1991:2); pada dasarnya laporan keuangan adalah proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan. Selanjutnya laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan
- b. SAK (Standar Akuntansi Keuangan) laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya: laporan arus kas (dana) catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan
- c. Sofyan S, Harahap (2013:105); laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.
- d. Gumanti (2011:103) laporan keuangan adalah ringkasan dari harta, kewajiban dan kinerja operasi selama periode akuntansi tertentu. (Septiana, 2019, pp. 1-2)

Laporan keuangan harus dibuat dengan standar tertentu sehingga laporan keuangan perusahaan dapat mudah dipahami, relevan, handal dan dapat digunakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Salah satu fungsi laporan keuangan yang cukup penting adalah sebagai bahan untuk perbandingan.

- a. Tujuan pelaporan keuangan

Tujuan atau pelaporan keuangan (*objective or purpose of financial reporting*) adalah memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan yang berguna bagi investor sekarang dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya untuk membuat

keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Selain bagi penyedia modal (investor), informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan juga mungkin berguna bagi pengguna lain dari pelaporan keuangan yang bukan merupakan investor. (Weygandt, 2019, p. 7)

Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan sangatlah beragam begitu juga dengan metode pengamnilamn keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka untuk memproses informasi. Pengguna informasi akuntansi harus dapat memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan lewat laporan keuangan.

Laporan keuangan juga seharusnya memberikan informasi mengenai asetb kewajiban dan modal perusahaan untuk membantu investor dan kreditor serta pihak-pihak lainnya dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, serta tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Informasi ini akan membantu user menentukan kondisi keuangan perusahaan. Disisi lain informasi mengenai laba perusahaan yang diukur dengan *accrual accounting* pada umumnya memberikan dasar yang lebih baik dalam hal memprediksi kinerja perusahaan di masa mendatang dari pada informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas di dlam kerangka kerja konseptual akuntansi disebutkan bahwa focus utama dari pelaporan keuangan adalah informasi mengenai kinerja perusahaan yang diberikan oleh ukuran laba dan komponen komponennya.

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan tujuan umum laporan keuanagan adalah:

- 1) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan dengan tujuan:
 - a) Menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan
 - b) Menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan
 - c) Menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya
 - d) Kemampuan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan
- 2) Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan tujuan:
 - a) Memberikan gambaran tentang jumlah deviden yang diharapkan pemegang saham
 - b) Menunjukkan kemampuan perusaha dalam membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pemerintah dan kemampuannya dalam mengumpulkan dana untuk kepentingan ekspansi perusahaan
 - c) Memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam pelaksanaan fungsi pelaksanaan dan pengendalian
 - d) Menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba jangka panjang
- 3) Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba
- 4) Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban
- 5) Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan. (Hery S.E, 2016, pp. 4-5)

b. Unsur-unsur laporan keuangan

Badan pembuat standar akuntansi telah mendefinisikan 10 unsur laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan

Berikut adalah definisi dari masing-masing kesepuluh unsur laporan keuangan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh badan pembuat standar akuntansi:

- 1) **Aset** adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa dimasa lalu.
- 2) **Kewajiban** adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini, untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.
- 3) **ekuitas** adalah kepemilikan atau kepentingan residu dalam aset entitas yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajiban.
- 4) **investasi oleh pemilik** adalah kenaikan ekuitas (aset bersih) entitas yang dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagian kepemilikannya. Aset adalah bentuk paling umum diterima sebagai investasi oleh pemilik.
- 5) **Distribusi kepada pemilik** adalah penurunan ekuitas (aset bersih) entitas yang disebabkan oleh penyerahan aset atau terjadinya kewajiban entitas kepada pemilik distribusi kepada pemilik ini akan menurunkan bagian kepemilikan (modal) entitas.
- 6) **Laba komprehensif** adalah perubahan dalam ekuitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik.
- 7) **Pendapatan** adalah arus masuk aset atau peningkatan lainnya atas aset atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengirim barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

- 8) **Beban** adalah arus keluar aset atau penggunaan lainnya atas aset atau terjadinya kewajiban entitas yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.
- 9) **Keuntungan** adalah kenaikan dalam ekuitas (aset bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi peripheral (transaksi di luar operasi sentral perusahaan) atau transaksi insedentil (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.
- 10) **Kerugian** adalah penurunan dalam ekuitas (aset bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi peripheral (transaksi di luar operasi sentral perusahaan) atau transaksi insedentil (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik. (Hery S.E, 2016, pp. 11-13)

4. PSAK Nomor 16 Tentang Aset Tetap

PSAK Nomor 16 adalah standar akuntansi yang di susun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan perusahaan mengenai aset tetap. PSAK Nomor 16 tentang aset tetap disahkan oleh dewan standar akuntansi keuangan tanggal 29 November 2011 yang tercemin dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Tujuan dari PSAK Nomor 16 adalah sebagai acuan dalam penyajian pengakuan, pengukuran saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan dan pengukapan aset tetap

5. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2014

Tentang tata cara permohonan dan penetapan masa manfaat yang sesungguhnya atas harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan

Bagian 1

- (1) Untuk keperluan penyusutan, harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dikelompokkan menjadi Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 3, dan Kelompok 4.
- (2) Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009, untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam Kelompok 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian 2

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya dari suatu harta berwujud bukan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat dimasukkan ke dalam Kelompok 3, Wajib Pajak dapat memperoleh penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan tersebut sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya.
- (2) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan

dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dan dilampiri:

- a. penjelasan terperinci mengenai aktiva
 - b. spesifikasi aktiva dari produsen;
 - c. perkiraan umur aktiva/masa manfaat ekonomis dari Penilai Publik
 - d. dokumen teknis pendukung dari produsen mengenai masa manfaat aktiva; dan
 - e. keputusan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan yang sudah pernah diperoleh.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir Tahun Pajak diperolehnya harta berwujud bukan bangunan.

6. Penyusutan berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK)

Berdasarkan prinsip perbandingan (*matching principles*), sebagian dari biaya perolehan aset tetap dialokasikan sebagai beban dalam periode yang sama dengan periode diperolehnya penghasilan. Secara bertahap, biaya perolehan aset tetap tersebut akan dialokasikan ke periode di mana pendapatan tersebut direalisasikan. Jadi, alokasi biaya perolehan aset tetap secara sistematis dan rasional ke periode ketika manfaat dari aset tetap bersangkutan diperoleh, dinamakan penyusutan. Penyusutan dilakukan sebagai akibat berkurangnya manfaat dari aset tetap tersebut penyusutan periodik diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan.

Tujuan dilakukannya penyusutan adalah untuk membandingkan antara pendapatan (penghasilan) dan beban atas aset tetap. Dalam praktiknya pembelian (perolehan) aset tetap tidak selalu terjadi pada awal

periode akuntansi, tetapi bisa terjadi pada saat-saat tertentu sepanjang tahun. Apabila pembelian aset tetap terjadi sebelum tanggal 15, pembelian tersebut dianggap seolah-olah terjadi pada awal bulan yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila perusahaan membeli aset tetap tanggal 15 atau setelahnya, pembelian tersebut dianggap seolah-olah terjadi pada awal bulan berikutnya dan penyusutan mulai dilakukan pada bulan berikutnya. Dalam hal-hal tertentu, misalnya masalah waktu pengakuan terjadinya transaksi pembelian aset tetap maupun metode penyusutan aset tetap yang digunakan dapat berbeda-beda antara kepentingan perpajakan. (Puwarji, 2017, pp. 201-202)

Penyusutan merupakan cara untuk mengalokasikan biaya. Penyusutan (*depreciation*) adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud kepada beban secara sistematis dan rasional pada periode-periode dimana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan aset. (Weygandt, 2019, p. 697)

Ketika perusahaan menghapus biaya perolehan aset berumur panjang selama berapa periode, mereka menggunakan istilah penyusutan. Perusahaan menggunakan istilah deplesi (*depletion*) untuk menggambarkan pengurangan biaya perolehan sumber daya mineral (seperti minyak gas dan batu bara) selama periode waktu tertentu. Kadaluwarsanya aset tak berwujud seperti paten atau hak cipta, disebut sebagai amortisasi (*amortization*).

Berikut Faktor-faktor dalam proses penyusutan yang terlibat

a. Basis penyusutan untuk aset

Dasar yang ditetapkan untuk penyusutan adalah fungsi dari dua faktor: biaya perolehan asli dan nilai residual. Nilai residual (*residual value*) atau disebut juga nilai sisa (*salvage value*) adalah perkiraan jumlah yang akan diterima perusahaan ketika menjual aset atau berhenti memakainya. Nilai tersebut adalah nilai yang menjadi nilai residual setelah perusahaan menurunkan nilai atau menyusutkan aset selama umur manfaat dari sudut pandang kepraktisan perusahaan

sering kali menetapkan nilai residual sama dengan nol. Namun beberapa aset berumur panjang memiliki residual yang cukup besar.

b. Estimasi umur manfaat

Seringkali dalam perusahaan terjadi perbedaan antara umur manfaat aset dengan umur manfaat fisiknya. Seperti mesin yang mungkin secara fisik dapat memberikan produk tertentu bertahun-tahun pada saat umur manfaat berakhir.

Perusahaan menghentikan penggunaan aset karena dua alasan: faktor fisik (seperti kerusakan atau berakhir umur fisik) dan faktor ekonomi (usang). Faktor fisik, misalkan keausan dan kerusakan yang membuat aset tersebut sulit melakukan tugasnya tanpa batas. Faktor-faktor fisik tersebut menentukan batas untuk umur manfaat aset.

Faktor-faktor ekonomi atau fungsional terbagi menjadi tiga:

a. Ketidakcukupan (*inadequacy*)

Terjadi ketika aset berhenti menjadi manfaat bagi perusahaan karena kebutuhan perusahaan telah berubah. Misal, adanya kebutuhan akan bangunan yang lebih besar untuk menangani peningkatan produksi. Meskipun bangunan yang lebih besar untuk menangani peningkatan produksi, meskipun bangunan tua mungkin masih bagus, tetapi aset tersebut menjadi tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.

b. *Supersession* adalah pengantian salah satu aset lain yang lebih efisien dan ekonomis.

c. Keusangan (*obsolescence*) mencakup semua situasi lainnya yang tidak termasuk dalam ketidakcukupan dan supersession.

Selama masa pemakaian, kemampuan suatu aset tetap untuk memperoleh pendapatan semakin menurun atau terbatas, sehingga perlu dilakukan penyusutan terhadap aset tetap. Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan atau dioperasikan sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan. Dalam praktiknya, faktor fisik dan faktor fungsional untuk menentukan masa kegunaan suatu aset tetap sangat

tergantung dari jenis, sifat, dan pola pemakaian aset itu sendiri. Sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang memengaruhi masa manfaat suatu aset tetap:
 - 1) Mengukur daya pakai aset, daya pakai suatu aset tetap dinilai dengan memperkirakan kapasitas terpasang atau keluaran hasil produksi. Misalnya kapasitas produksi untuk penggunaan mesin-mesin, kapasitas daya angkut untuk truk, dan sebagainya.
 - 2) Penaksiran dalam tingkat keausan fisik, keausan fisik suatu aset tetap yang digunakan untuk operasional tergantung dari sering atau tidaknya penggunaan asset program pemeliharaan dan perbaikan serta perawatan pada saat tidak digunakan juga menjadi faktor keausan aset.
 - 3) Keusangan teknis dan komersial, perubahan terhadap pola produksi atau perubahan selera (permintaan) atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset yang bersangkutan pada umumnya, faktor keusangan dan komersial disebabkan karena aset tersebut (teknologi) tidak memadai lagi dan ketinggalan jaman (*out of date*).
 - 4) Pembatasan hukum atau sejenisnya, dan regulasi dari pemerintahan. Contohnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan suatu perusahaan maka dalam undang-undang perpajakan mengatur mengenai pembatasan dan pengelompokan jenis maupun umur aset tetap.
- b. Faktor-faktor penentuan besarnya penyusutan

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa perhitungan besarnya penyusutan aset tetap dilakukan untuk memenuhi prinsip penandingan (*matching principle*) antara pendapatan dan beban guna menentukan laba rugi periodik. Oleh karena itu, tingkat akurasi dalam menghitung besarnya penyusutan aset tetap sangat diperlukan. Penyusutan periodik merupakan hasil alokasi dari biaya

perolehan aset tetap. Besarnya penyusutan yang dibebankan ke tiap-tiap periode akuntansi dipengaruhi oleh empat faktor berikut:

- 1) Biaya perolehan, biaya perolehan aset tetap adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset sehingga aset tersebut siap digunakan. Biaya-biaya perolehan ini yakni harga faktur bersih (setelah dikurangi potongan) ditambah dengan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga aset siap dioperasikan oleh perusahaan.
- 2) Nilai residu, nilai residu adalah perkiraan nilai dari aset tetap pada akhirnya pemakainya atau pada saat pelepasan aset untuk tidak dipakai kembali nilai setelah dikurangi dengan biaya pelepasan. Pelepasan atau penghentian aset tetap tersebut dilakukn setelah aset mencapai umur atau kondisi yang diperkirakan kurang produktif.
- 3) Masa manfaat, masa manfaat adalah perkiraan kebermanfaatan suatu aset tetap untuk dapat digunakan dan masih memberikan manfaat secara ekonomi. Masa manfaat suatu aset tetap dapat berupa periode waktu manfaat (umur ekonomis) maupun jumlah unit atau jumlah produksi yang akan diperoleh dari hasil pemanfaatan aset tetap.
- 4) Sifat dan pola penggunaan sifat dan pola penggunaan merupakan sifat dan pola yang digunakan untuk memilih dan menentukan metode penyusutan yang tepat sehingga tujuan penandingan antara pendapatn dan beban dapat tercapai. Beban penyusutan periodic atas aset tetap harus mencerminkan pola penggunaan dari aset tetap seakurat mungkin. (Puwarji, 2017, pp. 202-203)

7. Metode Penyusutan

Metode penyusutan adalah suatu metode sistematis dan rasional tentang pengalokasian biaya perolehan aset tetap sebagai beban sepanjang masa pemanfaatannya. Pemilihan metode penyusutan harus lebih hati-hati

karena metode yang dipilih untuk aset tetap tertentu belum tentu cocok dan sesuai dengan aset tetap yang lain. Metode penyusutan yang dipilih harus sesuai serta menggambarkan sifat dan pola penggunaan aset tetap. Metode yang dipilih juga digunakan secara konsisten. Ada beberapa metode penyusutan yang dapat dipakai untuk menghitung beban penyusutan secara periodic, metode tersebut yakni metode garis lurus (*straight line method*), saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit produksi (*sum of the unit of production method*).

a. Metode garis lurus (*straight line method*)

Dalam metode garis lurus, perhitungan besarnya penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan rumus yang sangat sederhana. Asumsi yang melandasi penerapan metode tersebut yakni aset yang dimiliki memberikan manfaat yang relative sama dari tahun ke tahun. Oleh Karena itu alokasi biaya perolehan aset tetap menurut metode garis lurus ini didasarkan atas waktu pemakaian. Metode garis lurus menghasilkan beban penyusutan periodic yang sama selama masa pakai aset tetap. Metode ini tidak cocok untuk aset tetap yang penggunaannya bersifat sangat fluktuatif sepanjang masa manfaatnya. Penyusutan berdasarkan metode garis lurus dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Beban Penyusutan/Tahun} = \frac{\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Manfaat (umur ekonomis)}}$$

b. Metode pembebanan yang menurun

Metode ini merupakan metode yang mempercepat penyusutan dengan cara menentukan nilai penyusutan lebih besar di tahun-tahun awal semakin kecil di tahun-tahun akhir. Ada beberapa alasan untuk menggunakan metode ini yaitu kontribusinya terhadap pendapatan tahunan yang semakin menurun dan sebagainya. Metode ini terdiri atas metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun dan metode saldo menurun berganda.

c. Metode jumlah angka tahun (sum of the year's digit method)

Dalam metode ini beban yang berhubungan dengan penggunaan aset tetap muncul karena dua hal, yaitu beban penyusutan dan beban pemeliharaan. Aset tetap memberikan manfaat yang dari tahun ke tahun semakin menurun. Besarnya nilai penyusutan yang semakin menurun ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa aset tetap yang relatif masih baru dapat dipakai secara lebih efisien dari pada aset tetap relative lebih sama. Sebaliknya beban pemeliharaan pada atahun-tahun pertama penggunaannya cenderung kecil dan semakin besar pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian beban operasional periodik (penyusutan dan pemeliharaan) selama umur ekonomisnya (masa manfaat) relative sama besar. Langkah –langkah untuk menghitung besarnya nilai penyusutan tiap-tiap tahun menurut metode jumlah angka tahun adalah sebagai berikut.

- 1) Posisi pembilang masing-masing tahun di beri bobot sebesar sisa masa manfaat pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Pada posisi penyebut jumlah bobot masa manfaat aset tetap (tahun) yang bersangkutan

Dapat pula dihitung dengan rumus

$$\text{Jumlah angka tahun} = \frac{N(N+1)}{2}$$

- 3) Penyusutan tiap-tiap tahun dihitung dengan cara mengendalikan perbandingan sisa masa manfaat dan jumlah angka tahun dengan biaya perolehan aset tetap yang disusutkan (*depreciable cost*) atau biaya perolehan aset tetap dikurangi dengan nilai residu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perhitungan besarnya nilai penyusutan dengan menggunakan metode jumlah angka tahun adalah sebagai berikut.

$$\text{Penyusutan/tahun} = \frac{\text{Sisa Masa Manfaat}}{\text{Jumlah angka Tahun}} \times (\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu})$$

$$\text{Jumlah Angka Tahun} = \frac{N(N+1)}{2}$$

Catatan: N adalah Masa Manfaat

d. Metode saldo menurun (*declining balance method*)

Pengunaan yang dilakukan dengan metode ini Besarnya nilai penyusutan aset tetap yang menggunakan metode ini adalah selalu menurun dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut sebesar persentase tertentu dari nilai buku (*book value*) adalah selisih nilai perolehan aset tetap dengan besarnya nilai akumulasi penyusutan yang telah dilakukan. Nilai buku aset tetap tersebut setiap tahun semakin menurun sampai dengan nilai tertentu pada akhir masa manfaatnya. Besarnya nilai penyusutan aset tetap per tahun dihitung dengan cara mengalikan tarif penyusutan dengan nilai buku aset tetap pada tahun yang bersangkutan. metode ini sering disebut dengan metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*). Cara menghitung penyusutan dengan metode saldo menurun ganda adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan/tahun} = 2 \times \text{Persentase dari Metode Garis Lurus} \times \text{Nilai Buku}$$

e. Metode aktivitas

metode ini digunakan untuk aset tetap yang pengoperasiannya sangat tergantung pada aktivitas penggunaan aset tetap itu sendiri. Artinya, semakin banyak aktivitasnya, semakin besar pula penyusutan dan sebaliknya. a. Ukuran aktivitas tersebut dapat dinyatakan dengan jumlah jam kerja, jumlah jam mesin, jumlah produk (unit produksi), atau lama (jam) layanan jasa yang diberikan. Metode ini membutuhkan taksiran total aktivitas selama pemanfaatan aset tetap yang bersangkutan. Perhitungan tariff penyusutan per aktivitas adalah dengan membagi biaya perolehan aset tetap yang disusutkan (biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu) dengan total taksiran aktivitas selama pemanfaatan aset tetap yang bersangkutan. Selanjutnya, menagalikan tariff per aktivitas dengan jumlah aktivitas yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan oleh karena itu, besarnya nilai penyusutan setiap metode bersifat fluktuatif, tergantung dari banyaknya aktivitas aset tetap. Penyusutan berdasarkan metode

aktivitas ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. (Puwarji, 2017, pp. 203-209)

$$\text{Beban penyusutan/ aktivitas} = \frac{\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Total Aktivitas}}$$

8. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

Dimana Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Dalam perhitungan dan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal karna berbeda dengan penyusutan akuntansi dalam pasal 11 UU PPh

- a. Metode garis lurus (straight-line method) Harta berwujud berupa bangunan (Pasal 11 Ayat (1))
- b. Metode garis lurus (straight-line method) dan Metode saldo menurun (declining balance method) harta berwujud lainnya selain bangunan, (Pasal 11 Ayat (2))

Tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan akuntansi (komersial). Mulai dari tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aset, tidak lagi secara gabungan (berdasarkan golongan) seperti yang

berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil (*small tolls*) yang sama atau sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

Di dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tarif Penyusutan Aset Tetap Menurut Peraturan Perpajakan

Kelompok Harta Berwujud		Masa Manfaat	Tariff Penyusutan Sebagaimana Dimaksud	
			Ayat (1)	Ayat (2)
I	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
	Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
	Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
	Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II	Bagunan			
	Permanen	20 Tahun	5%	
	Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

a. Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok I

Berikut ini jenis harta penyusutan fiskal atau jenis-jenis harta berwujud yang masuk kelompok I berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok Harta Berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

Tabel 2. 2
Jenis harta berwujud yang termasuk kedalam kelompok I

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1.	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotocopy, mesin accounting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak e. perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri atau jasa yang dijalankan pemilik usaha. f. Peralatan dapur untuk memasak, makan dan minum. g. Dies, Jigs dan mould h. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, fax, telepon seluler, inventaris kantor dan sejenisnya.
2.	Pertanian, perkebunan, kehutanan,	Alat yang digerakkan bukan dengan tenaga mesin. Contohnya cangkul, garu

	peternakan dan perikanan	dan peralatan lainnya yang dijalankan oleh tenaga manusia.
3.	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huler, pemecah kulit, penyosoh, pengering, <i>pallet</i> dan sejenisnya.
4.	Transportasi dan pergudangan	Taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5.	Industri semi konduktor	<i>Flash memory tester</i> (Penguji memori flash), <i>typewriter</i> , <i>bipolar test system</i> , <i>elimination (PE8-1)</i> , <i>pose checker</i> .
6.	Jasa persewaan peralatan tambat air dalam	<i>Anchor</i> , <i>Anchor Chains</i> , <i>Polyester Rope</i> , <i>Steel Buoys</i> , <i>Steel Wire Ropes</i> , <i>Morning Accessories</i> .
7.	Jasa telekomunikasi selular	<i>Base Station Controller</i> .

b. Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok II

Berikut ini jenis-jenis harta berwujud yang termasuk kelompok II berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok Harta Berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan

Tabel 2. 3
Jenis harta berwujud yang termasuk kedalam kelompok II

No	Jenis Usaha	Jenis Aset / Harta
1.	Semua jenis usaha	<p>a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. Alat pendingin seperti AC, kipas angin dan sejenisnya</p> <p>b. Mobil, bus, truk, perahu <i>speed boat</i> dan sejenisnya</p> <p>c. <i>Container</i> dan sejenisnya</p>
2.	Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan	<p>a. Mesin pertanian atau perkebunan seperti traktor & mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebaran benih dan sejenisnya.</p> <p>b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</p>
3.	Industri makanan dan minuman	<p>a. Mesin yang mengolah produk asal hewan, unggas dan perikanan. Seperti, pabrik susu dan pengalengan ikan.</p> <p>b. Mesin yang mengolah produk nabati misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum dan</p>

		tapioka. c. Mesin yang menghasilkan atau memproduksi minuman & bahan-bahan minuman berbagai jenis.
4.	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan atau memproduksi mesin ringan. Seperti mesin jahit & pompa air.
5.	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu b. Mesin yang mengolah / menghasilkan / memproduksi bahan, barang kehutanan.
6.	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, <i>dump</i> truk, <i>crane bulldozer</i> dan sejenisnya.
7.	Transportasi dan pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus yang dibuat untuk pengangkutan barang tertentu, Seperti gandum, batu-batuan, bijih tambang dan sejenisnya. Termasuk pula kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang memiliki berat sampai 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya

		<p>yang memiliki berat sampai 100 DWT;</p> <p>d. Perahu layar pakai / tanpa motor yang mempunyai berat sampai 250 DWT;</p> <p>e. Kapal balon.</p>
8	Telekomunikasi	<p>a. Perangkat pesawat telepon</p> <p>b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.</p>
9.	Industri semi konduktor	<p><i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tie bar cut press, trimming atau forming machine, wire bonder, wire pull tester.</i></p>
	Jasa penyewaan peralatan tambat air dalam	<p><i>Spooling machines, metocean data collector</i></p>

10.	Jasa telekomunikasi selular	<i>Mobile switching center, home location register, visitor location register, authentication center, equipment identity register, intelligent network service control point, intelligent network service management point, radio base station, transceiver unit, terminal SDH/mini link, antena.</i>
-----	-----------------------------	---

c. Jenis-Jenis Harta Berwujud Kelompok III

Berikut adalah jenis-jenis Harta Berwujud atau jenis harta penyusutan fiskal yang termasuk dalam kelompok III, berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 96/PMK.03/2009 :

Tabel 2. 4
Jenis harta berwujud yang termasuk kedalam kelompok III

No	Jenis Usaha	Jenis Aset
1.	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan
2.	Pemintalan, penenunan dan pencelupan kayu	<p>a. Mesin yang mengolah atau menghasilkan produk-produk tekstil. Seperti: kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol, bulu hewan, lena rami, permadani, kain-kain bulu dan tule).</p> <p>b. B. Mesin <i>preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging</i> dan sejenisnya.</p>

3.	Perkayuan	<p>a. Mesin yang mengolah atau menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput & bahan-bahan anyaman lainnya.</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu</p>
4.	Industri kimia	<p>a. Mesin peralatan yang mengolah / menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia. Seperti: bahan kimia anorganis, persenyawaan, organis dan anorganis dan logam mulia, elemenradio, isotop, bahan kimia organis dan lain-lainnya.</p> <p>b. Mesin yang mengolah / menghasilkan produk industri lainnya. (Seperti damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah)</p>
5.	Industri mesin	<p>Mesin yang menghasilkan atau memproduksi mesin menengah & berat. Misalnya mesin mobil & mesin kapal.</p>
6.	Transportasi dan pergudangan	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus yang dibuat untuk pengangkutan baran-barang tertentu, (seperti gandum, batu-batuan, biji tambang dan lain-lain) kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang</p>

		<p>mempunyai berat di atas 100 DWT sampai seribu DWT</p> <p>b. Kapal yang dibuat khusus untuk mendorong kapal lain, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang memiliki berat di atas 100 DWT sampai seribu DWT</p> <p>c. Dok terapung</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter berbagai jenis</p>
7.	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh

d. Jenis harta berwujud yang termasuk kelompok IV

Berikut adalah jenis-jenis Harta Berwujud atau jenis harta penyusutan fiskal yang termasuk dalam kelompok IV, berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 96/PMK.03/2009 :

Tabel 2. 5
Jenis harta berwujud yang termasuk kedalam kelompok IV

No	Jenis Usaha	Jenis Aset/Harta
1.	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2.	Transportasi dan pergudangan	<p>a. Lokomotif uap pada tender untuk rel</p> <p>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber</p>

		<p>luar.</p> <p>c. Lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>d. Kereta, gerbong, penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus yang dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan salah satu alat atau beberapa alat pengangkut</p> <p>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus yang dibuat untuk pengangkutan barang tertentu, yang beratnya di atas seribu DWT.</p> <p>F. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya yang mempunyai berat di atas seribu DWT.</p> <p>G. Dok – dok terapung</p>
--	--	---

9. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui secara standar akuntansi yang lazim. Laba fiskal adalah laba yang diperoleh wajib pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan sehingga dapat diketahui jumlah

pajak yang sebenarnya terutang, sehingga laba akuntansi dapat ditandingkan dengan penghasilan kena pajak yang menjadi dasar penghitungan PPh Badan (Mahpudin , 2020, p. 294)

Penyesuaian fiskal adalah proses menyesuaikan laporan keuangan. Khususnya laporan laba rugi yang disusun berdasarkan pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK) dengan peraturan perpajakan. Penyesuaian diperlukan mengingat adanya pengakuan atau pengukuran Yang berbeda antara PSAK dengan peraturan perpajakan, terhadap pos-pos penghasilan. Meliputi usaha dan luar usaha, serta pos biaya usaha dan biaya luar usaha. Penyesuain fiskal dapat mengakibatkan tiga kemungkinan yaitu laba fiskal akan menajadi lebih besar, lebih kecil atau sama dengan laba menurut PSAK. Penyesuaian fiskal dibedakan menajadi dua yaitu:

a. Koreksi Fiskal Positif

Penyesuaian fiskal yang berdampak kepada naik atau bertambahnya laba fiskal disebut koreksi fiskal positif. Secara sederhana, koreksi positif terhadap penghasilan terjadi apabila penghasilan fiskal lebih besardibandingkan dengan penghasilan menurut PSAK. Sebaliknya, biaya koreksi positif dapat terjadi apabila biaya fiskal lebih kecil dibandingkan biaya menurut PSAK.

b. Koreksi Fiskal Negatif

Penyesuaian fiskal yang berdampak pada turun atau berkurangnya laba fiskal disebut koreksi fiskal negatif. Secara sederhana, koreksi negatif terhadap penghasilan terjadi apabila penghasilan fiskal lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan menurut PSAK. Sebaliknya, biaya koreksi positif terjadi apabila biaya fiskal lebih besar dibandingkan biaya menurut PSAK.

Setelah laba fiskal diperhitungkan dengan kompensasi kerugian tahun sebelumnya penghasilan kena pajak (PKP) menjadi dasar penerapan tarif PPh dan selanjutnya menghitung PPh terutang. (Kusuma, 2019, p. 14)

Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam penggunaan system maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan pendapatan maupun biaya untuk mendapatkan penghasilan kena pajak.

Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak yang terutang yang diakui dalam laporan laba rugi komersial dengan pajak yang terutang menurut fiskal. Perbedaan besarnya pajak yang terutang tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi apabila perhitungan pajak yang diakui dalam laporan laba rugi Komersial dilanjutkan dengan memperhitungkan adanya koreksi fiskal

10. Laba Usaha

Laba merupakan selisih antara pendapatan dengan beban sehingga laba dapat mengukur masukan (dalam bentuk yang diukur dengan biaya) dan keluaran (dalam pendapatan yang diperbolehkan) (Septiana, 2019, p. 155)

Menurut (Martani, 2012:113) Kinerja perusahaan tercermin dari pencapaian laba yang diperoleh sebagai selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Laba merupakan pendapatan yang diperoleh apabila jumlah finansial (uang) dari aset neto pada akhir periode (di luar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi aset neto pada awal periode (Salmah, 2018, pp. 123-124).

11. Hubungan Penyusutan Aset Tetap Dengan Laba Perusahaan

Biaya penyusutan aset tetap memiliki pengaruh terhadap perolehan laba karena biaya penyusutan aset tetap salah satu unsur biaya operasional. Metode penyusutan yang diterapkan didalam perusahaan dan nilai penyusutan akan dialokasikan pada biaya operasional dilaporan laba rugi, sehingga besarnya nilai penyusutan akan mempengaruhi besarnya laba yang di peroleh perusahaan pada suatu periode akuntansi.

Oleh karena itu pemilihan metode penyusutan dari beberapa metode yang ada haruslah tepat karena nilai penyusutan akan mempengaruhi besarnya laba perusahaan. Untuk aset tetap yang diikuti sertakan dalam proses produksi, maka nilai penyusutannya akan mempengaruhi perhitungan harga pokok penjualan dan harga pokok produksi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh perusahaan dalam jangka panjang. Laba yang diperoleh perusahaan akan sama. Hal tersebut berlaku pula untuk aset tetap yang tidak diikuti sertakan dalam proses produksi, maka nilai penyusutannya akan mempengaruhi besarnya biaya usaha yang secara tidak langsung mempengaruhi besarnya laba perusahaan.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Wico Jontarudi Tarigan (2019) Analisis Penerapan metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan pada PT. Jhonson & Jhonson. Jenis penelitian yang diteliti yaitu penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi wawancara dan study kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada PT Jhonson & Jhonson yaitu metode penyusutan yang digunakan yaitu metode penyusutan garis lurus disamping itu juga PT Jhonson & jhonson telah melakukan pemilihan metode penyusutan yang disesuaikan dengan pernyataan standar. Persamaan penelitian Wico Jontarudi Tarigan (2019) dengan penulis adalah sama-sama penyusutan aset tetap dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan.

Perbedaan penelitian Wico Jontarudi Tarigan (2019) dengan penulis adalah tempat penelitian yang dilakukan oleh penelitian di atas adalah PT jhonson & jhonson sedangkan penulis lakukan pada PT Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan disini penulis juga menggunakan penyusutan menurut perpajakan

sedangkan pada penelitian tersebut tidak menggunakan metode penyusutan menurut perpajakan.

2. Markus Muda (2017) Analisis Perhitungan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Psak No.16 Dan Undang-Undang Perpajakan Serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pt Kalanafat Putra. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu perhitungan beban penyusutan Aktiva Tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan beban penyusutan tersebut sebesar Rp. 3.065.183.754,- sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan sebesar Rp.2.779.832.468,- sehingga dari kedua Konsep perhitungan Beban Penyusutan tersebut menimbulkan perbedaan sebesar Rp. 285.351.286.- Perbedaan tersebut inilah penulis membuat perbandingan Beban Penyusutan. Laporan Keuangan PT. Kalanafat Putra dengan adanya Perbedaan metode penyusutan Aktiva tetap akibat adanya beda waktu yang disebabkan adanya perbedaan beban penyusutan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal menyebabkan besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Tahun Berjalan berbeda dimana menurut Komersial Perusahaan memiliki PKP sebesar Rp. 10.930.979.673. Sedangkan fiskal melaporkan bahwa perusahaan memiliki PKP sebesar Rp 11.216.330.959. Persamaan penelitian Markus Muda (2017) dengan penulis adalah sama-sama penyusutan aset tetap menurut SAK dan perpajakan dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan.

Perbedaan penelitian Markus Muda (2017) dengan penulis adalah tempat penelitian yang dilakukan oleh penelitian diatas adalah PT Klanafat Putra sedangkan penulis lakukan pada PT Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Rizka Tirtiana Putri (2021) Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan, Peraturan Perpajakan Dan Dampak Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Riau Mandiri

Perkasa Pekanbaru. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara langsung dan dokumentasi Perhitungan beban penyusutan Aktiva Tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan berbeda menurut Undang-Undang Perpajakan berdasarkan Perbedaan tersebut penulis membuat perbandingan Beban Penyusutan. Laporan Keuangan PT. Riau Mandiri Perkasa Di Pekanbaru dengan adanya Perbedaan metode penyusutan Aktiva tetap akibat adanya beda waktu yang disebabkan adanya perbedaan beban penyusutan antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal menyebabkan besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Tahun Berjalan berbeda. Persamaan penelitian Rizka Tirtiana Putri (2021) dengan penulis adalah sama-sama penyusutan aset tetap menurut SAK dan perpajakan dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan.

Perbedaan penelitian Rizka Tirtiana Putri (2021) dengan penulis adalah tempat penelitian yang dilakukan oleh penelitian diatas adalah PT Riau Mandiri Perkasa sedangkan penulis lakukan pada PT Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

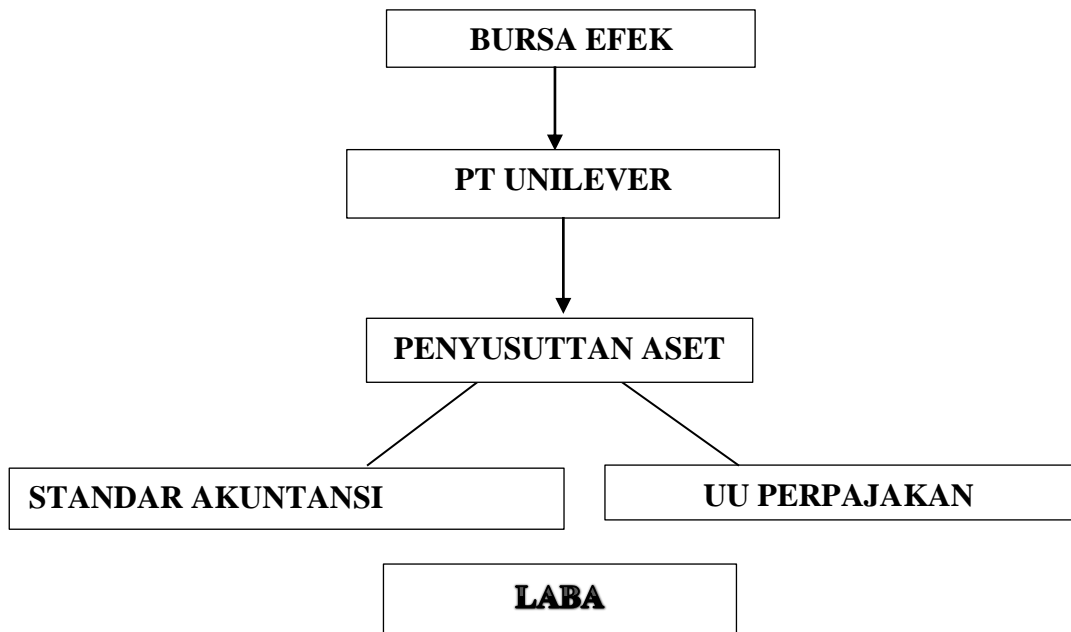
4. Losiana Lowis (2012) Analisis Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Serta Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan di Kantor PDAM Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan perhitungan perusahaan, SAK dan Perpajakan berbeda tarifnya. Sehingga beban penyusutan yang sebenarnya menurut SAK lebih besar dibandingkan dengan perhitungan perusahaan. Dan beban penyusutan menurut perpajakan lebih besar dibandingkan dengan perhitungan SAK dan perusahaan. Sehingga laba (rugi) usaha menurut perhitungan perusahaan sebesar (Rp. 768.514.176,69). Berdasarkan perhitungan SAK laba (rugi) usaha sebesar (Rp. 768.514.176,69), sedangkan menurut UU Perpajakan laba (rugi) usaha sebesar (Rp. 331.968.592,8). Sedangkan selisih biaya

penyusutan menurut SAK adalah sebesar Rp. 21.028.454.088,39 dan UU Perpajakan sebesar Rp. 4.935.203.904,20. Hal ini disebabkan oleh perusahaan membebankan penyusutan pada bulan berikutnya, sedangkan perolehan aktiva tetap pada awal bulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perhitungan penyusutan aktiva tetap menurut standar keuangan akuntansi dan undang-undang perpajakan sangat memberikan dampak atau pengaruh terhadap laporan keuangan pada PDAM Kota Gorontalo. Persamaan penelitian Losiana Lowis (2012) dengan penulis adalah sama-sama penyusutan aset tetap menurut SAK dan perpajakan dan pengaruhnya terhadap laba perusahaan.

Perbedaan penelitian Losiana Lowis (2012) dengan penulis adalah tempat penelitian yang dilakukan oleh penelitian diatas adalah dikantor PDAM Kota Gorontalo sedangkan penulis lakukan pada PT Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

C. Kerangka Berfikir

Berikut ini dikemukakan bagan kerangka pikir dapat dilihat dari gambar bagan dibawah ini:



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif, penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang dapat dicapai dengan menggunakan beberapa prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan kuantitatif lebih memusatkan perhatian pada gejala atau fenomena-fenomena yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia, yang dinamakan sebagai variable. Pendekatan kuantitatif hakikatnya hubungannya di antara variable- variable yang dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. (Laut Merta, 2020, p. 6). Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis laporan keuangan PT. Unilever Indonesia Tbk yaitu dengan mengelola data-data dari Bursa Efek Indonesia.

B. Tempat dan waktu penelitian

Penulis melakukan penelitian mengenai analisis perbandingan perhitungan penyusutan aset tetap menurut standar akuntansi dan perpajakan serta pengaruh terhadap laba perusahaan. Data diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

**Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian**

No	Uraian	2021					2022
		Agustus	Sept	Okto	Nov	Des	Jan
1	Observasi awal						
2	Bimbingan Proposal Skripsi						
3	Seminar Proposal						
4	Perbaikan Setelah Seminar						
5	Penelitian						
6	Bimbingan Skripsi						
7	Munaqasah						

C. Sumber data

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan perusahaan Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 yang penulis dapatkan dari situs resmi pada Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

D. Populasi dan Sampel

Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini, adalah jumlah aset tetap pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sampel pada penelitian ini yaitu 5 tahun pada tahun 2016-2020 dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap pada perusahaan untuk membuat perbandingan perhitungan penyusutan aset tetap menurut standar akuntansi keuangan dan perpajakan pada PT Unilever Indonesia Tbk.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah melalui dokumentasi, yaitu data yang diperoleh seperti laporan keuangan. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data/file yang tersedia yang sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berbentuk data-data penjualan yang terjadi pada perusahaan Unilever Indonesia Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI dan memiliki laporan keuangan publikasi pada periode tahun 2016-2020.

F. Teknik analisis data

Teknik analisis dari penelitian ini, adalah menghitung penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus menurut standar akuntansi keuangan No 16 dan peraturan perpajakan Nomor PER-20/PJ/2014. Dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta yang nampak, dimana fakta tersebut dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang dan dapat diambil satu kesimpulan dari permasalahan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum PT Unilever Indonesia

1. Profil PT Unilever Indonesia

Unilever adalah satu perusahaan terdepan yang bergerak pada produk *home and personal care* serta *foods & ice cream* di Indonesia. Rangkaian produk Unilever Indonesia mencakup merek-merek ternama yang disukai di dunia seperti Domestos, Molto, Rinso, Cif, Unilever Pure, Surf, Sunlight, Vixal, Super Pell, Wipol, Lux, Rexona, Lifebuoy, Sunsilk, Closeup, Fair&Lovely, Zwitsal, Pond's, TRESemme, Dove, Pepsodent, AXE, Clear, Vaseline, Citra, Citra Hazeline, SariWangi, Bango, Blue Band, Royco, Buavita, Wall's Buavita, Wall's, Lipton, Magnum, Cornetto, Paddle Pop, Feast, Populaire dan Viennetta.

Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama "Lever's Zeepfabrieken N.V." yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara berdasarkan akta No. 23 dari Mr. A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Jenderal Geoual van Nederlandsch-Indie berdasarkan surat No. 14 pada 16 Desember 1933, terdaftar di Raad van Justitie, Batavia No. 302 pada 22 Desember 1933 dan diterbitkan dalam Javasche Courant pada 9 Januari 1934,

Pada 22 Juli 1980, Perusahaan berganti nama menjadi "PT Unilever Indonesia" dengan akta No. 171 dari notaris Ny. Kartini Muljadi SH. Perubahan nama pun kembali terjadi pada 30 Juni 1997 menjadi "PT Unilever Indonesia, Tbk." dengan akta No. 92 notaris publik Bp. Mudofir Hadi SH. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No.C2-1.049HT.01.04 TH.98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 2620 tanggal 15 Mei 1998,

Pada 22 November 2000, Unilever Indonesia mengadakan perjanjian dengan PT Anugrah Indah Pelangi, untuk mendirikan

perusahaan baru yaitu PT Anugrah Lever (PT AL) yang bergerak di bidang manufaktur, pengembangan, pemasaran dan penjualan dari kecap, saus cabai serta saus lainnya seperti Bango dan merek lain di bawah lisensi perusahaan untuk PT AL.

Berselang dua tahun, tepatnya pada 3 Juli 2002, Unilever Indonesia kembali mengadakan perjanjian dengan Texchem Resources Berhad untuk mendirikan perusahaan baru yaitu PT Technopia Lever yang bergerak di bidang distribusi, ekspor dan impor barang-barang dengan merek dagang Domestos Nomos. Pada 7 November 2003, Texchem Resources Berhad menandatangani perjanjian jual beli saham dengan Technopia Singapore Pte. Ltd, di mana Texchem Resources Berhad setuju untuk menjual semua sahamnya di PT Technopia Lever ke Technopia Singapore Pte. Ltd.

Dalam Rapat Umum Luar Biasa Perusahaan pada 8 Desember 2003, Unilever Indonesia menerima persetujuan dari pemegang saham minoritasnya untuk mengakuisisi saham PT Knorr Indonesia (PT KI) dari Unilever Overseas Holdings Limited (pihak terkait). Akuisisi ini efektif berjalan pada tanggal penandatanganan perjanjian jual beli saham antara perusahaan dan Unilever Overseas Holdings Limited pada 21 Januari 2004.

Pada 30 Juli 2004, Unilever Indonesia bergabung dengan PT KI. Merger dicatat dengan menggunakan metode yang mirip dengan metode penyatuan kepemilikan. Perusahaan adalah perusahaan yang bertahan dan setelah merger PT KI tidak lagi sebagai badan hukum yang terpisah. Penggabungan ini sesuai dengan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam surat No. 740 / III / PMA / 2004 tanggal 9 Juli 2004. Pada 2007, Perusahaan menandatangani perjanjian bersyarat untuk membeli merek "Buavita" dan "Gogo" minuman Vitality berbasis buah dari Ultra. Transaksi selesai pada Januari 2008. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada 1981 dan terdaftar di

Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Saat ini, Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang memiliki lebih dari 40 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka Cikarang dan Rungkut, Surabaya. Pabrik serta produk-produk kami juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lebih dari 4000 karyawan turut berkontribusi dalam perkembangan bisnis kami bagi kami karyawan merupakan aset penting perusahaan dan kami percaya peningkatan kapasitas para karyawan secara berkelanjutan dapat mendukung perusahaan agar tetap kompetitif. Unilever adalah perusahaan yang dibangun atas dasar *purpose* (tujuan mulia) *purpose* merupakan 'jantung' dari segala yang kami lakukan baik sebagai karyawan, brand, maupun perusahaan. Setelah lebih dari 87 tahun *purpose* kami tidak pernah berubah, kami ingin menjadikan kehidupan berkelanjutan sebagai hal yang lumrah untuk dimiliki. Kami selalu berupaya menciptakan masa depan yang lebih baik setiap harinya melalui produk-produk dan kampanye kami. Kami juga menginspirasi masyarakat untuk mengambil tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membuat perubahan bagi dunia. Kami bertekad untuk mengelola dan menerapkan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan agar dapat terus berkembang seraya mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan dampak sosial positif bagi masyarakat. Sejak 2010, komitmen keberlanjutan Unilever yang tercantum pada strategi Unilever Sustainable Living Plan (USLP) telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat serta lingkungan. Kini setelah lebih dari 10 tahun penerapan USLP di Indonesia, perusahaan memperkuat komitmen untuk menumbuhkan bisnis yang berkelanjutan yang berlandaskan pada tujuan mulia (*purpose-led*) dan relevan serta mampu bersaing di masa depan (*future-fit*), strategi ini dinamakan The Unilever Compass. Kami memiliki tiga kepercayaan bahwa *brand* dengan tujuan mulia akan

bertumbuh (*brnd with purpose grow*), perusahaan dengan tujuan mulia akan bertahan (*company with purpose last*) dan individu dengan tujuan mulia akan berkembang (*people with purpose thrive*).

The nilever ompass memiliki 3 fokus utama yaitu:

1. Membangun planet yang lebih lestari
2. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
3. Berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif

2. **Visi dan Misi PT Unilever Indonesia tbk**

a. Visi

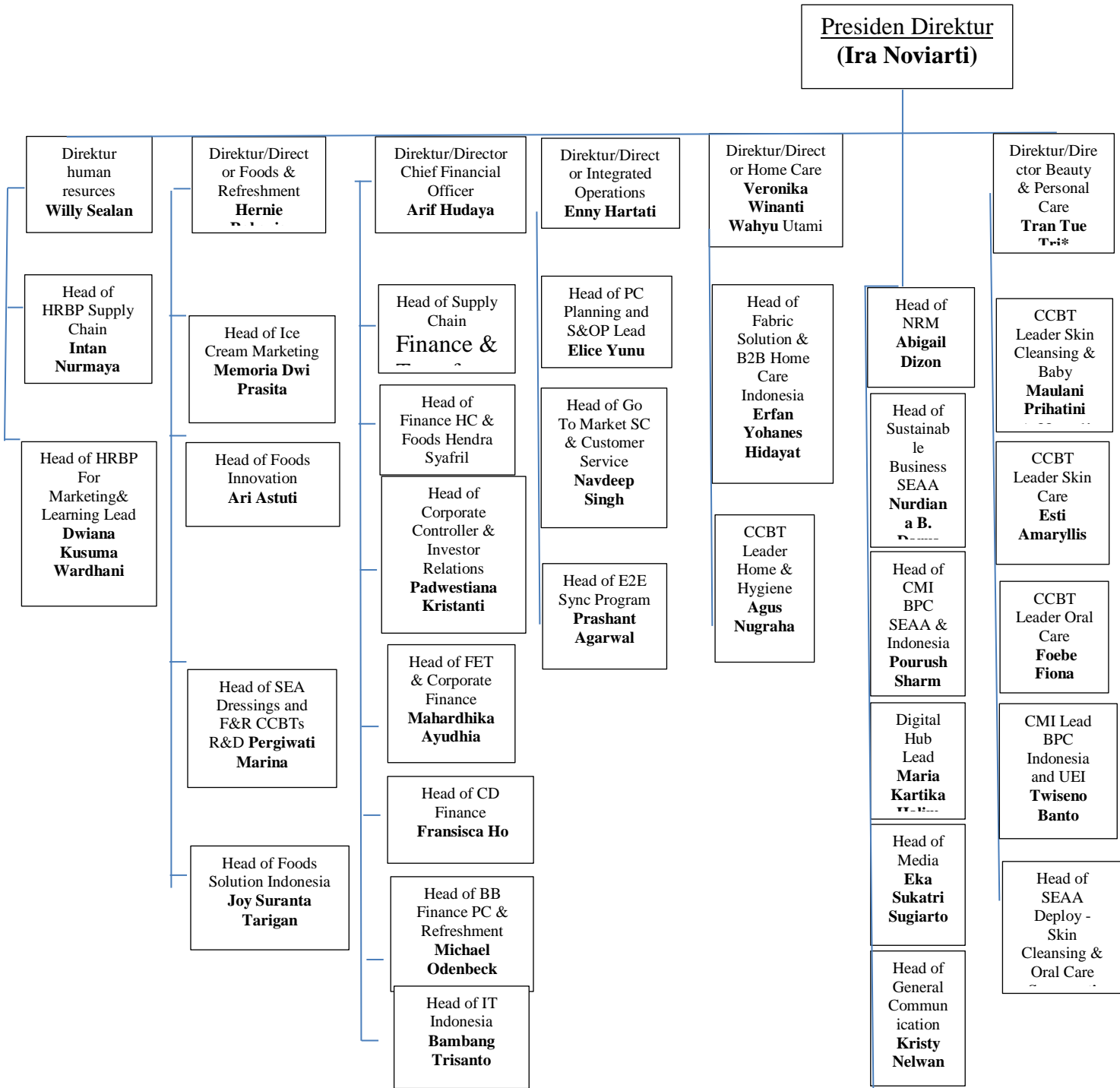
Perusahaan untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang indonesia setiap harinya

b. Misi:

- Kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari.
- Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain.
- Kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia.
- Kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk terus bertumbuh seraya mengurangi dampak terhadap lingkungan.

3. **Struktur Organisasi PT Unilever Indonesia**

Untuk mencapai tujuan dan misi perusahaan, suatu perusahaan memerlukan struktur organisasi agar aktivitas dari perusahaan dapat berjalan lancar. Struktur organisasi ini berguna sebagai garis wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan sehingga pengawasan atas kegiatan- kegiatan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Berikut adalah struktur organisasi PT Unilever Idonesia Tbk.



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi

Tanggung Jawab Setiap Direktur:

1. Ira Noviarti (Presiden Direktur)
Bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas usaha Perseroan dan memastikan terpenuhinya seluruh tanggung jawab tata kelola
2. Arif Hudaya (Direktur, *Chief Financial Officer*)
Bertanggung jawab atas *Finance & Accounting, Corporate Management Accounting, Business Systems, IT & ERP*
3. Rizki Raksanugraha (Direktur, *Supply Chain*)
Bertanggung jawab atas *Commercial Supply Chain, Customer Services, Supply Management, Quality Assurance & Environment, Supply & Demand Planning, Engineering & Safety, Manufacturing, Logistics.*
4. Enny Hartati (Direktur, *Integrated Operations*)
Bertanggung jawab atas integrasi operasional di Indonesia.
5. Badri Barayanan (Direktur, *Customer Development*)
Bertanggung jawab atas *Activation Implementation Management, Sales Operations, Customer Marketing & Trade Category Management, Commercial Customer Development, Customer Development Management.*
6. Veronika Winanti Wahyu Utami (Direktur, *Home Care And Marketing Services*)
Bertanggung jawab atas *Home Care Commercial dan Home Care Marketing*
7. Willy Saelan (Direktur, *Human Resources*)
Bertanggung jawab atas *Corporate General Affairs, HR Business Partners, Industrial Relations, Expertise Team (Talent, Learning), Remuneration, Service Delivery Centre, Medical Services.*
8. Hernie Raharja (Direktur, *Foods & Refreshment*)

Bertanggung jawab atas *Foods & Refreshment Commercial, Foods & Refreshment Marketing dan Food Solutions Business Unit*

9. Reski Damayanti (Direktur, *General Counsel* dan Sekretaris Perusahaan)

Bertanggung jawab atas fungsi hukum, sekretaris perusahaan, serta integritas bisnis.

10. Tran Tue Tri (Direktur, *Personal Care*)

Bertanggung jawab atas *Personal Care Commercial dan Personal Care Marketing*.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyusutan aset tetap berdasarkan Komersial

Penyusutan merupakan proses mengalokasikan biaya aset berwujud untuk menjadi beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode mendapatkan manfaat dari penggunaan Aset tetap tersebut. Beban penyusutan aset tetap pada PT Unilever Indonesia Tbk dihitung menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan komersial berikut umur manfaat aset tetap nya:

Umur Manfaat Aset Tetap

Nama Aset	Umur manfaat
Bangunan	40
Mesin dan Peralatan	3-20
Kendaraan Bernotor	8

$$\text{Beban Penyusutan/Tahun} = \frac{\text{Biaya Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Masa Manfaat (umur ekonomis)}}$$

Berikut penulis melampirkan tabel penyusutan PT Unliever Indonesia Tbk pada periode tahun 2016-2020:

Tabel 4. 1
Penyusutan Aset Tetap Menurut Komersial PT Unilever Indonesia Tbk
Periode 2016-2020.

(Dalam jutaan Rupiah)

N0	Tahun	Keterangan	Harga Perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi penyusutan
1	2016	Tanah	277,326	-	-
		Bangunan	1,671,729	40,897	249,704
		Mesin dan Peralatan	8,406,615	485,228	2,607,592
		Kendaraan Bermotor	33,106	3,490	13,414
		Jumlah	10,388,776	529,615	2,870,710
2	2017	Tanah	277,326	-	-
		Bangunan	2,599,252	58,288	305,131
		Mesin dan Peralatan	9,855,080	570,991	3,050,997
		Kendaraan Bermotor	25,898	3,582	10,955
		Jumlah	12,757,556	632,861	3,367,083
3	2018	Tanah	277,326	-	-
		Bangunan	2,811,544	67,915	373,046
		Mesin dan Peralatan	10,626,795	684,643	3,566,289
		Kendaraan Bermotor	15,205	2,032	5,181
		Jumlah	13,730,870	754,590	3,944,516
4	2019	Tanah	277,326	-	-
		Bangunan	2,877,363	71,944	441,066
		Mesin dan Peralatan	10,871,782	792,551	4,124,408
		Kendaraan Bermotor	14,671	2,665	5,558
		Jumlah	14,041,142	867,160	4,571,032
5	2020	Tanah	277,326	-	-
		Bangunan	2,978,370	72,727	513,301
		Mesin dan Peralatan	11,515,538	767,010	4,735,841
		Kendaraan Bermotor	13,540	1,916	5,728
		Jumlah	14,784,774	841,653	5,254,870

Sumber Data: Data dari Perusahaan

Dari data penyusutan tersebut diperoleh penyusutan aset tetap yang terdiri dari bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor dengan total beban penyusutan sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Penyusutan Aset Tetap PT Unilever Indonesia Tbk.

No	Tahun	Beban penyusutan
1.	2016	Rp. 529,615.000.000
2.	2017	Rp. 632,861.000.000
3.	2018	Rp. 754,590.000.000
4.	2019	Rp. 867,160.000.000
5.	2020	Rp. 841,653.000.000

Sumber Data: Laporan Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk.

Dari data penyusutan aset tetap tersebut total keseluruhan penyusutan pada Desember 2016 harga perolehan berjumlah Rp. 10,388,776.000.000 Akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2016 sebesar Rp. 2,870,710.000.000 dan Beban Penyusutan sebesar Rp. 529,615.000.000. Untuk tahun 2017 harga perolehan aset tetap naik menjadi Rp. 12,757,556.000.000 Akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2017 sebesar Rp. 3,367,083.000.000 dan untuk beban penyusutan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 632,861.000.000. Untuk tahun 2018 harga perolehan aset tetap sebesar Rp. 13,730,870.000.000 Akumulasi penyusutan aset tetap nya sebesar Rp. 3,944,516.000.000 dan untuk beban penyustan aset tetap pada tahun ini sebesar Rp. 754,590.000.000. Untuk tahun 2019 harga perolehan aset tetap sebesar Rp. 14,041,142.000.000 Akumulasi penyusutan aset tetap nya sebesar Rp. 4,571,032.000.000 dan untuk beban penyustan aset tetap pada tahun ini sebesar Rp. 867,160.000.000. Untuk tahun 2020 harga perolehan aset tetap sebesar Rp. 14,784,774.000.000 Akumulasi penyusutan aset tetap nya sebesar Rp. 5,254,870.000.000 dan untuk beban penyustan aset tetap pada tahun ini sebesar Rp. 841,653.000.000.

2. Penyusutan aset tetap menurut Perpajakan

$$\text{Beban Penyusutan/Tahun} = \frac{\text{Biaya Perolehan}}{\text{Masa Manfaat (umur ekonomis)}}$$

Dari sini penulis mengambil contoh perhitungan penyusutan aset tetap PT Unilever Indonesia Tbk, pada tahun 2016 yaitu bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor dimana disini bangunan termasuk kedalam kelompok permanen dengan harga perolehan Rp. 1,671,729 dengan umur manfaat 20 tahun, untuk mesin dan peralatan termasuk ke dalam kelompok 2 dengan harga perolehan Rp. 8,406,615 dan umur manfaatnya 8 tahun dan untuk kendaraan bermotor masuk kedalam kelompok 1, dengan harga perolehan sebesar Rp. 33,106 dengan umur ekonomis 4 tahun.

a. Bangunan

$$\begin{aligned} \text{Biaya penyusutan /tahun} &= \frac{1,671,729}{20} \\ &= 83,586.45 \end{aligned}$$

b. Mesin dan peralatan

$$\begin{aligned} \text{Biaya penyusutan / tahun} &= \frac{8,406,615}{8} \\ &= 1,050,826.875 \end{aligned}$$

c. Kendaraan bermotor

$$\begin{aligned} \text{Biaya penyusutan / tahun} &= \frac{33,106}{4} \\ &= 8,276.5 \end{aligned}$$

Berikut penulis melampirkan tabel perhitungan biaya penyusutan PT Unilever Indonesia yang dimulai dari tahun 2016-2020

Tabel 4. 3
Penyusutan aset tetap menurut perpajakan
PT Unilever Indonesia Tbk

(Dalam jutaan Rupiah)

No	Tahun	Aset Tetap	Umur Manfaat	Tarif	Harga Perolehan	Beban Penyusutan
1	2016	Tanah	-	-	277,326	-
		Bangunan	20	5%	1,671,729	83,586.45
		Mesin dan Peralatan	8	12,5%	8,406,615	1,050,826.875
		Kendaraan Bermotor	4	25%	33,106	8,276.5
		Jumlah			10,388,776	1,142,689.825
2	2017	Tanah	-	-	277,326	-
		Bangunan	20	5%	2,599,252	129,962.6
		Mesin dan Peralatan	8	12,5%	9,855,080	1,231,885
		Kendaraan Bermotor	4	25%	25,898	6,474.5
		Jumlah			12,757,556	1,368,322.1
3	2018	Tanah	-	-	277,326	-
		Bangunan	20	5%	2,811,544	140,577.2
		Mesin dan Peralatan	8	12,5%	10,626,795	1,328,349.375
		Kendaraan Bermotor	4	25%	15,205	3,801.25
		Jumlah			13,730,870	1,472,727.825
4	2019	Tanah	-	-	277,326	-
		Bangunan	20	5%	2,877,363	143,868.15
		Mesin dan Peralatan	8	12,5%	10,871,782	1,358,972.75
		Kendaraan Bermotor	4	25%	14,671	3,667.75
		Jumlah			14,041,142	1,506,508.65
5	2020	Tanah	-	-	277,326	-
		Bangunan	20	5%	2,978,370	148,918.5
		Mesin dan Peralatan	8	12,5%	11,515,538	1,439,442.25
		Kendaraan Bermotor	4	25%	13,540	3,385
		Jumlah			14,784,774	1,591,745.75

Sumber Data: Data diolah.

Beban penyusutan yang dihitung menurut ketentuan perpajakan. Berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 untuk tarif penyusutan dan peraturan menteri keuangan nomor 96/PMK.03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok Harta Berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Dalam Undang-Undang Perpajakan tanah tidak dapat disusutkan. Asset tetap yang disusutkan terdiri bangunan pada perusahaan ini termasuk kedalam kelompok bangunan permanen dengan tarif penyusutan sebesar 5%, mesin dan peralatan termasuk kedalam bukan bangunan dan termasuk kedalam kelompok 2 dengan tarif 12,5%, dan untuk kendaraan bermotor termasuk kedalam kelompok 1 dengan tarif 25%.

Dari data penyusutan aset tetap diatas dapat dilihat harga perolehan aset tetap pada tahun 2016 sebesar Rp. 10,388,776 dan beban penyusutan menurut Undang-Undang Perpajakan yaitu sebesar Rp 1,142,689.825. Pada tahun 2017 harga perolehan aset tetap sebesar Rp. 12,757,556 dan beban penyusutan menurut Undang-undang Perpajakan sebesar Rp. 1,368,322.1, pada tahun 2018 harga perolehan aset tetap sebesar Rp. 13,730,870 dan beban penyusutan menurut Undang-Undang Perpajakan sebesar Rp. 1,472,727.825, untuk tahun 2019 harga perolehan aset tetap yaitu sebesar Rp. 14,041,142 dan untuk beban penyusutan menurut Undang-Undang Perpajakan pada tahun ini sebesar Rp. 1,506,508.65, dan untuk tahun 2020 harga perolehan aset tetap 14,784,774 dan untuk beban penyusutan menurut Undang-Undang Perpajakan sebesar Rp. 1,591,745.75. Dalam Undang-Undang Perpajakan tanah tidak dapat disusutkan. Asset tetap yang disusutkan terdiri bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan bermotor.

Setelah penulis melakukan perhitungan beban penyusutan aset tetap baik menurut standar akuntansi keuangan maupun peraturan perpajakan, terdapat selisih yang terbilang banyak berikut penulis melampirkan tabel perbandingan tersebut:

Tabel 4. 4
Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dan Peraturan Perpajakan
Periode 2016-2020

(Dalam jutaan Rupiah)

NO	Tahun	Aset Tetap	Harga Perolehan	Perusahaan		Perpajakan		Selisih
				Umur manfaat	Beban penyusutan	Umur manfaat	Beban penyusutan	
1.	2016	Tanah	277,326	-	-	-	-	-
		Bangunan	1,671,729	40	40,897	20	83,586.45	42,689.45
		Mesin dan Peralatan	8,406,615	3-20	485,228	8	1,050,826.875	565,598.875
		Kendaraan Bermotor	33,106	8	3,490	4	8,276.5	4,786.5
		Jumlah	10,388,776		529,615		1,142,689.825	613,074.825
2.	2017	Tanah	277,326	-	-	-	-	-
		Bangunan	2,599,252	40	58,288	20	129,962.6	71,674.6
		Mesin dan Peralatan	9,855,080	3-20	570,991	8	1,231,885	660,894
		Kendaraan Bermotor	25,898	8	3,582	4	6,474.5	2,892.5
		Jumlah	12,757,556		632,861		1,368,322.1	735,461.100
3.	2018	Tanah	277,326	-	-	-	-	-
		Bangunan	2,811,544	40	67,915	20	140,577.2	72,662.2
		Mesin dan Peralatan	10,626,795	3-20	684,643	8	1,328,349.375	643,709.375
		Kendaraan Bermotor	15,205	8	2,032	4	3,801.25	1,769.25
		Jumlah	13,730,870		754,590		1,472,727.825	718,137.825

	Tahun	Aset Tetap	Harga Perolehan	Perusahaan		Perpajakan		Selisih
				Umur manfaat	Beban penyusutan	Umur manfaat	Beban Penyusutan	
4.	2019	Tanah	277,326	-	-	-	-	-
		Bangunan	2,877,363	40	71,944	20	143,868.15	71,924.15
		Mesin dan Peralatan	10,871,782	3-20	792,551	8	1,358,972.75	566,421.75
		Kendaraan Bermotor	14,671	8	2,665	4	3,667.75	1,002.75
		Jumlah	14,041,142		867,160		1,506,508.65	639,348.650
5.	2020	Tanah	277,326	-	-	-	-	-
		Bangunan	2,978,370	40	72,727	20	148,918.5	76,191.5
		Mesin dan Peralatan	11,515,538	3-20	767,010	8	1,439,442.25	672,432.25
		Kendaraan Bermotor	13,540	8	1,916	4	3,385	1,469
		Jumlah	14,784,774		841,653		1,591,745.75	750,092.750

Sumber Data : Data diola

Berdasarkan tabel analisis perbandingan di atas menunjukkan bahwa:

1. Beban penyusutan terjadi selisih koreksi negatif pada tahun 2016 sebesar Rp. 42,689.45, pada tahun 2017 sebesar Rp. 71,674.6 Pada tahun 2018 sebesar Rp. 72,662.2, pada tahun 2019 sebesar Rp. 71,924.15, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 76,191.5, untuk penyusutan bangunan.
2. Beban penyusutan terjadi selisih koreksi negatif pada tahun 2016 sebesar Rp. 565,598.875, pada tahun 2017 sebesar Rp. 660,894 pada tahun 2018 sebesar Rp. 643,709.375, pada tahun 2019 sebesar Rp. 566,421.75, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 672,432.25 untuk penyusutan mesin dan peralatan.
3. Beban penyusutan terjadi selisih koreksi negatif pada tahun 2016 sebesar Rp. 4,786.5, pada tahun 2017 sebesar Rp. 2,892.5, pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,769.25, pada tahun 2019 sebesar Rp. 1,002.75, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,469, untuk penyusutan kendaraan bermotor.

Nilai beban penyusutan berdasarkan akuntansi keuangan pada tahun 2016 sebesar Rp. 529,615.000.000 sedangkan untuk penyusutan menurut peraturan perpajakan sebesar Rp. 1,142,689.825.000 adanya selisih negatif antara penyusutan menurut standar akuntansi dan perpajakan pada tahun 2016 sebesar Rp. 613,074.825.000. Pada tahun 2017 penyusutan nya sebesar Rp. 632,861.000.000 sedangkan untuk perpajakan sebesar Rp. 1,368,322.100.000 dengan selisih negatif penyusutan tersebut sebesar Rp. 735,461.100.000.

Pada tahun 2018 penyusutan nya sebesar Rp. 754,590.000.000 sedangkan untuk perpajakan sebesar Rp. 1,472,727.825.000 dengan selisih Rp. 718,137.825.000 Pada tahun 2019 penyusutan nya sebesar Rp. 867,160.000.000 sedangkan untuk perpajakan sebesar Rp. 1,506,508.650.000 dengan selisih Rp. 639,348.650.000 Pada tahun 2020 penyusutan nya sebesar Rp. 841,653.000.000 sedangkan untuk perpajakan sebesar Rp. 1,591,745.750.000 dengan selisih Rp. 750,092.750.000.

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan temporer, dikarenakan adanya perbedaan dalam perhitungan biaya penyusutan dari kedua konsep perhitungan penyusutan aset tetap, adapun perbedaan antara keduanya yaitu:

1. Dalam Standar Akuntansi Keuangan aset tetap tidak dikelompokkan dan untuk umur ekonomis setiap aset tidak ditentukan sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan aset tetap dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok bukan bangunan dan kelompok bangunan, untuk kelompok bukan bangunan terbagi menjadi 4 kelompok berdasarkan umur ekonomisnya, dan untuk kelompok bangunan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu permanent dan bukan permanen.
2. Dalam perhitungan penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan ada tarif sedangkan untuk Undang-Undang Perpajakan tarif di tetapkan oleh peraturan perpajakan untuk menghitung penyusutannya.
3. Dalam perhitungan penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan terdapat nilai sisa, sehingga dengan adanya nilai sisa akan berpengaruh terhadap jumlah penyusutnya sedangkan untuk Undang-Undang Perpajakan tidak menggunakan nilai sisa
4. Dalam Standar Akuntansi Keuangan masa manfaat suatu aset di tentukan berdasarkan pengalaman terhadap jenis aset tetap dalam penentuan umur manfaat diperlukan pertimbangan seperti factor pemakaian dan lain-lain sedang menurut Undang-Undang Perpajakan umur manfaat sudah ditentukan dalam Undang-Undang itu sendiri.
5. Di dalam Standar Akuntansi Keuangan metode penyusutan terdapat beberapa metode yaitu: Metode Penyusutan Garis Lurus (Straight Line Method), Metode Penyusutan Saldo Menurun (Double Declining Balance Method), Metode Penyusutan Jumlah Angka Tahun (Sum of The Year Digit Method) Metode Penyusutan Satuan Hasil Produksi (Productive Output Method), Metode Penyusutan Satuan Jam Kerja (Service Hours Method), sedangkan dalam Undang-Undang perpajakan hanya menggunakan 2 metode saja yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun.

Maka hal ini menunjukkan bahwa perhitungan penyusutan menurut perpajakan lebih besar dibandingkan dengan perhitungan menurut perusahaan. Hal ini tentu saja berdampak pada laporan keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk.

Antara penyusutan menurut Standar akuntansi Keuangan dan Perpajakan tersebut terjadilah koreksi fiskal, dan penyusutan tersebut juga berdampak pada laba perusahaan. Berikut lampiran koreksi fiskal penyusutan aset tetap PT Unilever Indonesia:

Tabel 4. 5
Koreksi Fiskal Penyusutan Aset Tetap PT Unilever Indonesia Tbk
yang Berakhir 31 Desember 2016

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Perusahaan	Koreksi Fiskal Positif	Koreksi Fiskal Negatif	Fiskal
Penjualan bersih	40,053,732	-	-	40,053,732
Harga pokok penjualan	(19,206,095)	-	-	(19,206,095)
Laba bruto	20,847,637	-	-	20,847,637
Beban-beban pemasaran	(7,654,214)	-	-	(7,654,214)
Beban umum dan adm	(3,957,098)	-	-	(3,957,098)
Penyusutan	(529,615)	-	613,074.825	(1,142,689.825)
Beban lain-lain	951	-	-	951
Laba usaha	8,707,661	-	-	8,093,635.175
Penghasilan keuangan	7,468	-	-	7,468
Biaya keuangan	(143,244)	-	-	(143,244)
Laba sebelum pajak penghasilan	8,571,885	-	-	7,957,859.175

Sumber Data : data diolah

Tabel 4. 6
Koreksi Fiskal Penyusutan Aset Tetap PT Unilever Indonesia Tbk
yang Berakhir 31 Desember 2017

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Perusahaan	Koreksi Fiskal Positif	Koreksi Fiskal Negatif	Fiskal
Penjualan bersih	41,204,510	-	-	41,204,510
Harga pokok penjualan	(19,530,683)	-	-	(19,530,683)
Laba bruto	21,673,827	-	-	21,673,827
Beban-beban pemasaran	(7,693,637)	-	-	(7,693,637)
Beban umum dan adm	(3,842,909)	-	-	(3,842,909)
Penyusutan	(632,861)		735,461.100	(1,368,322.1)
Beban lain-lain	9,212	-	-	9,212
Laba usaha	9,513,596	-	-	8,778,170.9
Penghasilan keuangan	3,579	-	-	3,579
Biaya keuangan	(127,682)	-	-	(127,682)
Laba sebelum pajak penghasilan	9,371,661	-	-	8,654,067.9

Sumber: data diolah

Tabel 4. 7
Koreksi Fiskal Penyusutan Aset Tetap PT Unilever Indonesia Tbk
yang Berakhir 31 Desember 2018

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Perusahaan	Koreksi Fiskal Positif	Koreksi Fiskal Negatif	Fiskal
Penjualan bersih	41,802,073	-	-	41,802,073
Harga pokok penjualan	(20,170,342)	-	-	(20,170,342)
Laba bruto	21,631,731	-	-	21,631,731
Beban-beban pemasaran	(7,561,200)	-	-	(7,561,200)
Beban umum dan adm	(3,859,927)	-	-	(Rp. 3,859,927)
Penyusutan	(754,590)	-	718,137.825	(1,472,727.825)
Beban lain-lain	2,822,616	-	-	2,822,616
Laba usaha	12,278,630	-	-	11,560,492.175
Penghasilan keuangan	15,776	-	-	15,776
Biaya keuangan	(108,642)	-	-	(108,642)
Laba sebelum pajak penghasilan	12,185,764	-	-	11,467,626.175

sumber: data diolah

Tabel 4. 8
Koreksi Fiskal Penyusutan Aset Tetap PT Unilever Indonesia Tbk
yang Berakhir 31 Desember 2019

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Perusahaan	Koreksi Fiskal Positif	Koreksi Fiskal Negatif	Fiskal
Penjualan bersih	42,922,563	-	-	42,922,563
Harga pokok penjualan	(20,262,204)	-	-	(20,262,204)
Laba bruto	22,660,359	-	-	22,660,359
Beban-beban pemasaran	(7,878,846)	-	-	(7,878,846)
Beban umum dan adm	(3,796,529)	-	-	(3,796,529)
Penyusutan	(867,160)	-	639,348.650	(1,506,508.650)
Beban lain-lain	3,082	-	-	3,082
Laba usaha	10,120,906	-	-	9,481,557.35
Penghasilan keuangan	11,096	-	-	11,096
Biaya keuangan	(230,230)	-	-	(230,230)
Laba sebelum pajak penghasilan	9,901,772	-	-	9,262,423.35

sumber: data diolah

Tabel 4. 9
Koreksi Fiskal Penyusutan Aset Tetap PT Unilever Indonesia Tbk
yang Berakhir 31 Desember 2020

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Perusahaan	Koreksi Fiskal Positif	Koreksi Fiskal Negatif	Fiskal
Penjualan bersih	42,972,474	-	-	42,972,474
Harga pokok penjualan	(19,955,515)	-	-	(19,955,515)
Laba bruto	23,016,959	-	-	23,016,959
Beban-beban pemasaran	(8,453,197)	-	-	(8,453,197)
Beban umum dan adm	(4,290,975)	-	-	(4,290,975)
Penyusutan	(841,653)	-	750,092.750	(1,591,745.750)
Beban lain-lain	(20,122)	-	-	(20,122)
Laba usaha	9,411,012	-	-	8,660,919.25
Penghasilan keuangan	4,647	-	-	4,647
Biaya keuangan	(248,790)	-	-	(248,790)
Laba sebelum pajak penghasilan	9,206,869	-	-	8,416,776.25

Sumber: data diolah

Dari data diatas menunjukkan adanya perbedaan laba antara perusahaan dan perhitungan perpajakan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap penyusutan asset tetap dimana laba berdasarkan perusahaan pada tahun 2016 sebesar Rp.8,571,885.000.000, sedangkan menurut perpajakan sebesar Rp. 7,957,859.175.000 untuk tahun 2017 dimana laba berdasarkan perusahaan pada tahun tersebut naik sebesar Rp. 9,371,661.000.000, sedangkan menurut perpajakan sebesar Rp. 8,654,067.900.000, untuk tahun berikutnya dimana laba berdasarkan perusahaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 12,185,764.000.000, sedangkan menurut perpajakan sebesar Rp. 11,467,626.175.000, untuk tahun selanjutnya laba berdasarkan komersial mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar Rp. 9,901,772.000.000, sedangkan menurut perpajakan sebesar Rp. 9,262,423.350.000, dan pada periode tahun 2020 laba berdasarkan komersial sebesar Rp. 9,206,869.000.000 dan menurut perpajakan sebesar Rp. 8,416,776.250.000.

Dari tabel diatas terlihat adanya koreksi fiskal negatif pada setiap tahunnya, dan dampaknya terhadap laba yang diperoleh perusahaan adalah laba komersial lebih tinggi dari pada laba fiskal.

Hasil penelitian penulis sejalan dengan penelitian Losiana Lowis (2012) Analisis Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Serta Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan di Kantor PDAM Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan perhitungan perusahaan, SAK dan Perpajakan berbeda tarifnya. Dampak atau pengaruh Akumulasi penyusutan terhadap laporan keuangan terutama laba/rugi yang diperoleh selama masa manfaat ekonomis dari aktiva tetap. Laba yang diperoleh dari perhitungan metode SAK menunjukkan lebih besar dari perpajakan karna penyusutan menurut SAK lebih kecil daripada Undang-Undang perpajakan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelian yang penulis lakukan dapat disimpulkan :

1. Perhitungan penyusutan aset tetap oleh perusahaan lebih kecil biaya penyusutan dari perhitungan perpajakan, hal ini dikarenakan perbedaan umur manfaat oleh perusahaan dengan perpajakan.
2. Laba perusahaan lebih besar dari laba fiskal sehingga mengakibatkan terjadinya koreksi fiskal negatif

B. Saran

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengubah subjek penelitian dan disarankan untuk mengembangkan penelitian menggunakan pendekatan lainnya agar mampu memperluas hasil penelitian yang ada ke arah yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Bahri, S. (2020). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS Edisi III*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET.
- Hanggara, A. (2019). *Pengantar Akuntansi*. Surabaya: CV.Jakad Publishing.
- Herry. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Hery S.E, M. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Husein, U. (2013). *Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, I. K. (2019). *Praktikum Pajak Penghasilan (PPh Badan)*. Yogyakarta: CV Andi Ofset.
- Laut Merta, I. m. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA.
- Lowis, L. (2012). *Analisis Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Serta Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan di Kantor PDAM Kota Gorontalo*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Mahpudin , E. K. (2020). *Perpajakan Pajak Terapan Brevet A&B*. Yogyakarta: CV Absolut Media.
- Muda, M. (2017). *Analisis Perhitungan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Menurut PSAK No.16 dan Undang-undang Perpajakan Serta Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan PT Kalanafat Putra*. Politeknik Katolik Saint Paul Sorong.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2014
- PMK NOMOR 96/PMK.03/2009
- Prihadi, T. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pura, R. (2013). *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*. Makassar : Erlangga.

- Purnairawan, E. S. (2021). *Pengantar Akuntansi*. Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA.
- Putra, I. M. (2020). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANAK HEBAT INDONESIA.
- Putri, R. T. (2021). *Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan, Peraturan Perpajakan Dan Dampak Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Riau Mandiri Perkasa Pekanbaru*. Riau: UIN SUSKA RIAU.
- Puwarji, A. D. (2017). *Pengantar Akuntansi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salmah, N. S. (2018). Determinan Pertumbuhan Laba Perusahaan Perdagangan enceran Berdasarkan Rasio Keuangan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 16.
- Septiana, A. (2019). *Analisi Laporan Keuangan Konsep Dasar dan Deskripsi laporan Keuangan*. Jawa Timur: DUTA MEDIA PUBLISHING.
- Syaiful, B. (2020). *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Yogyakarta : CV. ANDI OFFSET.
- Tarigan , W. J. (2019). *Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan pada PT. Jhonson & Jhonson* *Jurnal of Accounting USI Vol 1, No 1, Mei 2019*. Medan : Universitas Simalungun .
- Waluyo. (2019). *Akuntansi Pajak* . Jakarta: Salemba Empat.
- Weygandt, K. (2019). *Akuntansi Keuangan Menengah Intermedied Accounting*. Jakarta: Salemba Empat.